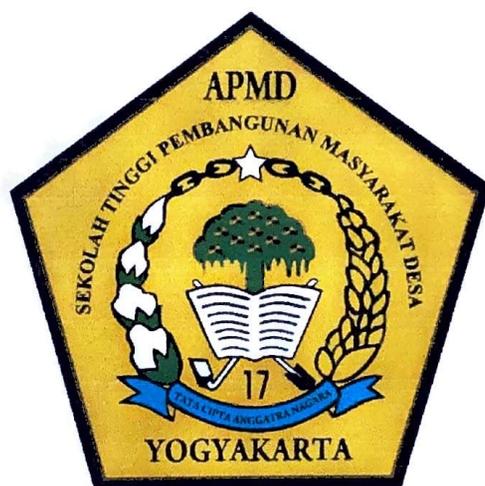


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BANTUL**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:
SYARIF HIDAYAT
20610012



**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

2024

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN BANTUL**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN BANTUL

Disusun oleh:

SYARIF HIDAYAT

20610012

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 05 Juli 2024

Susunan Tim Penguji

Nama
1. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.

Ketua/Pembimbing

2. Dr. Supardal, M.Si.

Penguji Samping I

3. Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan




Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Syarif Hidayat

NIM : 20610012

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 28 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Syarif Hidayat

HALAMAN MOTTO

Hiduplah dengan penuh rasa syukur, berkesadaran, dan keberanian.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini didedikasikan teruntuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa mengajarkan tanggung jawab, tolong menolong, rasa hormat, dan cinta kasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul” di waktu yang tepat.

Tesis ini tentunya dapat terselesaikan atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih tanpa batas kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M., selaku Direktur Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan sekaligus dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasinya.
3. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya dengan sabar memberikan saran dan masukan secara teliti kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna perbaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas akademika program studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan serta menjadi ruang dialektika kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga.

6. Bapak H. Abdul Halim Muslih dan Bapak Joko B. Purnomo, selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul, yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan informasi guna penulisan tesis ini.
7. Bapak H. Hanung Raharjo, S.T., selaku ketua DPRD Kabupaten Bantul yang telah mendukung dan berkenan memberikan data informasi.
8. Bappeda Bantul dan Dinas Sosial Bantul yang telah banyak membantu serta memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kajian serta mengumpulkan data pendukung untuk penulisan ini.
9. Orang tua tercinta, kakak, dan pasangan terkasih yang tidak pernah berhenti mengalirkan doa dan dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan kuliah ini dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
10. Pemerintah Kalurahan Wukirsari, yang telah menjadi tempat belajar dan berproses serta memberikan dukungan selama studi.
11. Teruntuk semua keluarga dan sahabat yang belum bisa penulis sebutkan, semoga rahmat Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan dan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, kritik dan saran yang membangun masih penulis butuhkan untuk perbaikan. Pada akhirnya, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Yogyakarta, 28 Juni 2024



Syarif Hidayat

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur.....	10
C. Fokus Penelitian.....	18
D. Rumusan Masalah.....	18
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
F. Kerangka Konsep.....	19
1. Pemerintah dan Pemerintahan.....	19
2. Kebijakan Publik.....	22
4. Kemiskinan	31
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	40

1. Jenis Data	40
2. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara.....	42
2. Observasi.....	46
3. Dokumentasi	46
D. Validasi Data	48
E. Teknik Analisis Data	48
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	51
1. Sejarah Kabupaten Bantul.....	51
2. Semboyan Kabupaten Bantul.....	53
3. Visi dan Misi.....	55
4. Kondisi Geografis	56
5. Kondisi Demografi Kabupaten Bantul.....	58
6. Kondisi Potensi Daerah Kabupaten Bantul.....	61
7. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat.....	62
B. Gambaran Program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul.....	63
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul	78
B. Analisis Indikator <i>Policy Output</i> Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul	88
1. Indikator Cakupan.....	88
2. Indikator Bias.....	112
3. Indikator Akses	115
4. Indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan.....	119

C.	Analisis Indikator <i>Policy Outcome</i> Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul	122
D.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul	130
	1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul	130
	2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul DIY	132
E.	Kebaruan.....	133
BAB V PENUTUP.....		134
A.	Kesimpulan	134
B.	Saran	136
C.	Keterbatasan Penelitian	137
DAFTAR PUSTAKA		138
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		141
1.	Panduan Wawancara.....	141
2.	Dokumentasi Penelitian	147
3.	Daftar Dokumen	151
4.	Daftar Observasi	151
5.	Form Pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019 – 2023	3
Tabel 2.1 Jenis Data, Informan dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
Tabel 2.2 Matriks Policy Output dan Policy Outcomes.....	50
Tabel 3.1 Jumlah Kalurahan, Padukuhan, dan Luas Kapanewon di Kabupaten Bantul	57
Tabel 3.2 Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kapanewon.....	60
Tabel 3.3 Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018-2022	62
Tabel 3.4 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	68
Tabel 3.5 Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan OPD.....	69
Tabel 4.1 Capaian IKS SIDAMESRA Tertinggi	84
Tabel 4.2 Capaian IKS SIDAMESRA Menengah	84
Tabel 4.3 Capaian IKS SIDAMESRA Terbawah	85
Tabel 4.4 Cakupan Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).....	90
Tabel 4.5 Cakupan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas.....	91
Tabel 4.6 Cakupan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	92
Tabel 4.7 Cakupan Penerima Manfaat Boga Sehat.....	93
Tabel 4.8 Cakupan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.....	94
Tabel 4.9 Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022	98
Tabel 4.10 Daftar CSR Kabupaten Bantul	102
Tabel 4.11 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Daerah dan target Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Bantul.....	126
Tabel 4.12 Pencapaian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2022	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2018 – 2022	5
Gambar 1.2 Siklus Hidup Kebijakan	25
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul	58
Gambar 4.1 Program Pelatihan	95
Gambar 4.2 Tampilan SIDAMESRA	107
Gambar 4.3 Tampilan Indikator dan Skor Instrumen SIDAMESRA	108
Gambar 4.4 Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat Kabupaten Bantul ..	110
Gambar 4.5 Tampilan Website Dinas Sosial Bantul.....	116
Gambar 4.6 Tampilan Formulir Aduan di Website Dinas Sosial Bantul.....	117
Gambar 4.7 Tampilan Tanggapan Formulir Aduan di Website Dinas Sosial Bantul	118

INTISARI

Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di D.I. Yogyakarta selama lima tahun terakhir. Hal ini mendorong dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan mengetahui keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dikonfirmasi dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Bantul terbagi menjadi tiga aspek strategi: program pengurangan beban, pemberdayaan masyarakat, dan sistem informasi/*big data* untuk akurasi data. Indikator *policy output* menunjukkan belum adanya sistem informasi yang memadai untuk menginformasikan masyarakat tentang status penerima bantuan. Ketidaktepatan sasaran bantuan juga terjadi karena diskresi di *street-level bureaucracy*. Penerima manfaat merasa program ini sesuai dengan kebutuhan mereka, namun diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Indikator *policy outcomes* menunjukkan bahwa beberapa sasaran strategis telah tercapai, seperti perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dengan target dan realisasi yang sesuai.

Kata kunci: kemiskinan; kebijakan; sistem informasi.

ABSTRACT

Bantul Regency has the highest number of poor people in D.I. Yogyakarta over the last five years. This prompted the issuance of Bantul Regency Regional Regulation Number 06 of 2017 concerning Poverty Alleviation. This study aims to describe the implementation and determine the success of this policy. The research uses a qualitative descriptive method with purposive sampling technique to determine informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The validity of the data was confirmed through source triangulation.

The results of the study show that the poverty alleviation policy in Bantul is divided into three strategic aspects: burden reduction programs, community empowerment, and information systems/big data for data accuracy. Policy output indicators show that there is still no adequate information system to inform the community about the status of aid recipients. Mistargeted assistance also occurs due to discretion in street-level bureaucracy. Beneficiaries feel that this program meets their needs, but tighter supervision is required. Policy outcomes indicators show that several strategic targets have been achieved, such as protection for those in need of social welfare services, with targets and realizations that are in line.

Keywords: poverty; policy; information system.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menurut Hall dan Midgley dalam (Nurhasanah et al., 2019) diterjemahkan sebagai adanya kondisi deprivasi sosial dan materi yang mendorong individu memiliki kehidupan di bawah standar hidup layak, atau juga dapat diartikan sebagai kondisi sebuah individu mengalami deprivasi relatif jika dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam kelompok masyarakat. Konsep kemiskinan juga didefinisikan sebagai kondisi ketidakcukupan penduduk memenuhi kebutuhan primer yang disebabkan oleh pengeluaran per kapita perbulannya masih di bawah garis kemiskinan (BPS, 2020).

Salah satu indikator terpenting keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah rendahnya angka kemiskinan. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai salah satu masalah utama dalam bidang pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur dengan perubahan garis kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan resesi. Dalam konteks seperti itu, kemiskinan berkaitan erat dengan daya tampung dan jumlah penduduk daerah tersebut.

Kemiskinan digambarkan sebagai keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan kualitas hidup yang buruk. Secara umum, kemiskinan menurut BPS didefinisikan sebagai suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan

masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (Umar et al., 2023).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan di negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan walaupun hasil yang didapatkan belum terlalu seperti yang diharapkan. Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dan dapat menikmati kekayaan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut dibuktikan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam vital yang dimiliki adalah seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh negara demi kepentingan dan juga kemakmuran rakyat Indonesia.

Masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya. Hak-hak yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki. Ukuran yang digunakan para analis dalam menetapkan jumlah penduduk miskin cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang dikatakan miskin apabila dalam pemenuhan kebutuhan pokok makanan asupan kalorinya minimal 2.100 kilokalori per hari per kapita, atau pemenuhan kebutuhan pokok non makanan (Rindiani & Hartatik, 2020).

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki 17 kapanewon, yaitu Kapanewon: Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak,

Bantul, Imogiri, Jetis, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Berdasarkan data booklet kemiskinan Kabupaten Bantul dari BPS Bantul tahun 2023, Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di D.I. Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul tahun 2022 dan 2023 menurun, namun secara data agregat atau jumlah penduduk miskin di DIY masih tetap menjadi yang tertinggi. Adapun perbandingan data jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota, provinsi DIY, dan nasional sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta dan
Nasional Tahun 2019 – 2023
(000 Jiwa)

WILAYAH	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	74,62	78,06	81,14	73,21	70,74
Bantul	131,15	138,66	146,98	130,13	128,51
Gunung Kidul	123,08	127,61	135,33	122,82	122,24
Sleman	90,17	99,78	108,93	98,92	97,50
Kota Yogyakarta	29,45	31,62	34,07	29,68	29,48
D.I.Yogyakarta	448,47	475,72	506,45	454,76	448,47
Nasional	25 144,70	26 424,02	27 542,77	26 161,16	25 898,55

Sumber: Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul, BPS 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Bantul selalu menempati urutan teratas jumlah penduduk miskin se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan terjadi pada tahun 2021 sebanyak 146.980 jiwa karena dampak dari pandemi covid-19. Data penduduk miskin tahun 2023 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih mendominasi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu sebanyak 128.510 jiwa, meskipun sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut sebanyak 2,5% diantaranya masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Berdasarkan data tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, maka diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut (Soetomo, 2015), untuk mengatasi masalah kemiskinan, terlebih dahulu harus ditelaah latar belakang dan sebab-sebabnya. Jika penyebab kemiskinan adalah akibat dari ketidakcukupan dan kelemahan individu, maka strategi pemecahannya lebih ditekankan pada upaya mengubah aspek manusia sebagai individu atau anggota masyarakat.

Data BPS tersebut, dilakukan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Pada saat awal pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul per Maret 2020 sebanyak 138,66 ribu jiwa, meningkat 5,73 persen dibanding tahun 2019. Setahun kemudian pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pada saat itu, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul per Maret 2021 meningkat sebesar 6,00 persen. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Covid-19 mulai berangsur-angsur mereda. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul per Maret 2022 turun 11,46 persen, dari 146,98 ribu jiwa menjadi 130,13 ribu jiwa. Pola peningkatan dan penurunan jumlah penduduk miskin di level

Provinsi D.I. Yogyakarta dan Nasional tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bantul.

Gambar 1.1
Garis Kemiskinan di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan Nasional
Tahun 2018 – 2022
(Rp/Kapita/Bulan)



Sumber: Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul, BPS 2022

Berdasarkan garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Pada gambar 1.1, terlihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Bantul selama Maret 2018 hingga Maret 2022 terus meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan garis kemiskinan di level provinsi D.I. Yogyakarta maupun level nasional yang juga terus meningkat. Jika dilihat dari besaran nilainya, garis kemiskinan Kabupaten Bantul masih berada di bawah garis kemiskinan provinsi D.I. Yogyakarta dan nasional. Sementara itu, garis kemiskinan provinsi D.I. Yogyakarta berada di atas garis kemiskinan nasional. Garis kemiskinan Kabupaten Bantul pada bulan Maret 2022 meningkat 6,51 persen, dari Rp418.265,00 per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp445.511,00 per kapita per bulan pada Maret 2022. Sementara itu garis

kemiskinan nasional Maret 2022 meningkat sebesar 6,97 persen dan garis kemiskinan provinsi D.I. Yogyakarta meningkat 8,04 persen.

Hingga saat ini, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah mendasar yang menjadi perhatian pemerintah di setiap daerah. Aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang andal untuk dapat mengetahui pola atau faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat menjadi alat yang ampuh bagi pembuat kebijakan untuk menarik perhatian pada kondisi kehidupan masyarakat miskin. Selanjutnya dengan mengetahui pola kemiskinan sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan kemiskinan pemerintah, membandingkan kemiskinan di berbagai waktu dan wilayah, dan menyoal masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi mereka.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia. Kemiskinan melemahkan kualitas sumber daya manusia, mengakibatkan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Ada juga masalah kemiskinan merupakan masalah yang berkaitan dengan faktor sosial, seperti meningkatnya kriminalitas di kota-kota besar, munculnya permukiman kumuh, memburuknya kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Telau et al., 2021).

Sedangkan pola penyebab kemiskinan dapat terjadi karena beberapa hal, yang pertama adalah pendapatan. Kedua adalah pendidikan. Pendidikan dan kemiskinan sangat berkaitan erat. Kemiskinan diartikan juga sebagai kegagalan dalam pendidikan. Ketiga, kesehatan merupakan aspek penting dari kesejahteraan

manusia sebagai aset manusia untuk meningkatkan kapasitas individu. Terakhir, konsumsi (pengeluaran) adalah pemanfaatan barang atau jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia (Auliah, 2019).

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul selalu menjadi prioritas pembangunan dari waktu ke waktu, mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan dan cenderung fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga berpedoman pada RJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Arah penanggulangan kebijakan kemiskinan di Kabupaten Bantul ini tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi saja, melainkan juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya setempat atau kearifan lokal. Sebagai contoh budaya malu untuk dikatakan sebagai warga miskin, nyatanya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena masih terdapat warga yang sudah masuk dalam kategori mampu namun tetap ingin menerima bantuan dari pemerintah sehingga tidak malu untuk dikategorikan sebagai warga miskin. Kasus seperti ini menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya angka kemiskinan yang terjadi secara nyata dari sudut pandang sosial budaya masyarakatnya.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial yakni Beras Sejahtera (Rastra) merupakan bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan dalam

pemenuhan kebutuhan pangan pokok (dalam hal ini beras) yang menjadi hak dasarnya. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bantul mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, sebagai contoh program jaminan kesehatan. Langkah-langkah untuk memerangi kemiskinan melalui program jaminan sosial tersebut adalah program negara atau dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Fahreza et al., 2019).

Program-program dari pusat tersebut kemudian diturunkan dan dilaksanakan oleh daerah, sehingga cenderung mengabaikan kondisi kemiskinan di daerah. Hal ini mengakibatkan kurangnya inovasi dalam pengentasan kemiskinan yang kemudian berkontribusi pada lemahnya kebijakan anti kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun berbagai macam program serta kegiatan untuk mengintervensi kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Bantul dalam sebuah wawancara yang menyampaikan bahwa total anggaran untuk mengatasi kemiskinan tahun 2023 ada sekitar 104 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut telah disusun sebanyak 25 program pengentasan kemiskinan yang dibagi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi, diantaranya program padat karya infrastruktur, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelayanan kesehatan gratis, pemberian makanan bergizi sehari dua kali atau boga sehat, serta pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin. (<https://jogjapolitan.harianjogja.com>, diakses 03 Januari 2024)

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, maka dikeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 06 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mandat dari implementasi perda tersebut. Sebagai contoh di Dinas Sosial, terdapat program jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin dan boga sehat untuk memberikan makanan bergizi. OPD lain seperti di Dinas Pekerjaan Umum terdapat program padat karya infrastruktur dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Selain program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2012 yang juga termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2017. Pembentukan TKPK Kabupaten Bantul sendiri diharapkan mampu mendorong agar bisa menganalisis terhadap kondisi kemiskinan di daerah dan mampu menetapkan prioritas. Selanjutnya tim ini ditugaskan melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilakukan melalui berbagai upaya, seperti dibentuknya regulasi di atas sebagai payung hukum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, kemudian diikuti dengan program-program penanggulangan kemiskinan, dan pembentukan TKPK Kabupaten Bantul sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan dengan tujuan dapat menurunkan angka garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul. Namun, pada realitanya tidak selamanya kebijakan dapat berjalan dengan baik, terkadang terjadi kegagalan dalam pelaksanaan implementasi kebijakannya.

Pokok bahasan ini adalah masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul masih menjadi pertanyaan krusial. Hal ini tentu berkaitan erat dengan masalah kemiskinan dan implementasinya. Soren C. Winter dalam (Fidarina & Megawati Suci Si.M., 2022) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat penting dari perumusan kebijakan hingga evaluasi kebijakan sendiri merupakan hubungan antara proses politik dan pemerintahan. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan dari mana ia muncul untuk formula politik. Selain itu, tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut juga sangat tinggi faktor sosial ekonomi dimana kebijakan dibuat.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum mampu mengentaskan kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan juga analisis mengenai indikator keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sehingga program tersebut dapat sesuai dengan permasalahan kemiskinan di daerah. Selain itu, program penanggulangan kemiskinan memiliki kecenderungan mengadopsi dari program pemerintah pusat sehingga tidak ada inovasi dan menyebabkan diskresi terhadap kebijakan dan permasalahan yang ada. Pemikiran inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk mengidentifikasi kebijakan kemiskinan di Kabupaten Bantul dan selanjutnya mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

B. Kajian Literatur

Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk

mencari perbandingan agar menemukan kebaruan penelitian dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga untuk membantu memantapkan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik peneliti:

1. (Setiawan & Jamaliah, 2023) meneliti tentang “*Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan dengan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan penanganan kemiskinan dari masa ke masa (mulai dari masa orde lama, orde baru, hingga reformasi). Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan dari pemerintah sangat berkaitan dengan strategi pengentasan masalah sosial kemiskinan. Melalui program yang diusung sebenarnya sudah bekerja dengan baik dengan mengusung program-program terbaru di tiap periode pemimpinnya.
2. (Agus Triono & Sangaji, 2023) meneliti tentang “*Faktor Mempengaruhi tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penekanan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data BPS tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh daya beli masyarakat tidak terdistribusi secara merata.

Kemudian, faktor pertumbuhan ekonomi dan penopang pendapatan yang tersalurkan dengan baik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

3. (Lismana et al., 2023) meneliti tentang “*Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Penajam Paser Utara*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program penanggulangan kemiskinan, menentukan prioritas kebijakan program penanggulangan kemiskinan serta merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang dapat digunakan sebagai informasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner dan wawancara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 macam, yaitu Analisis Kuantitatif Deskriptif, metode AHP dan Analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis statistik deskriptif menggunakan uji t-test, ditemukan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat efektif.
4. (Hamin et al., 2023) meneliti tentang “*Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, efektivitas implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, faktor yang mempengaruhi implementasi

kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, serta strategi penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Ambon telah dijabarkan melalui berbagai program kerja dan dibuat berdasarkan kebutuhan rumah tangga sasaran dan implementasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang terkait; Implementasi Kebijakan penanganan kemiskinan belum maksimal aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses; Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan adalah kekeliruan kebijakan, penyaluran bantuan sosial dan lemahnya akurasi data; serta strategi penanganan kemiskinan perkotaan di Kota Ambon dititikberatkan pada dimensi *political will* dan kelembagaan, kedua dimensi isi kebijakan dan ketiga dimensi lingkungan kebijakan.

5. (Wisnutama et al., 2023) meneliti tentang “*Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Madiun Tahun 2022. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 penanganan kemiskinan ekstrim melalui menambah pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan indikator utama angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun semakin efektif, hal ini menunjukkan secara persentase penduduk miskin ekstrim kecil tapi

secara jumlah pasti besar. Pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya, tetapi cara menanggulangi penduduk miskin ekstrem adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun telah menyiapkan berbagai program pemerataan pembangunan di setiap kecamatan, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial keagamaan, pemberdayaan perempuan dan anak, pekerjaan, serta partisipasi masyarakat.

6. (Nuryanto et al., 2022) meneliti tentang “*Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pengentasan Kemiskinan*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan oleh Pemerintah Daerah Pacitan dilihat dari perspektif Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif deskriptif dengan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan berbagai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara dan observasi dan sumber data sekunder melalui buku dan arsip Pemerintah Daerah Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Pacitan dalam mengentaskan kemiskinan memiliki berbagai program kebijakan seperti; SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, dan Gerbang Intan masih belum matang sehingga terkendala berbagai macam masalah sampai kehilangan realisasi.
7. (Handayani et al., 2023) meneliti tentang “*Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “*collaborative governance*”

dalam pengentasan kemiskinan di Bangkalan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan strategi penanggulangan kemiskinan apa yang digunakan di Bangkalan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “*colaborative governance*” dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Bangkalan tidak efektif dilihat dari kondisi awal, *design* institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin.

8. (Alawiyah & Setiawan, 2021) meneliti tentang “*Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat pedesaan, bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan kearifan lokal, dan bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan dalam proses penanggulangan kemiskinan. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: kondisi wilayah, pertumbuhan ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, ketimpangan, rasa ketergantungan, dan kenyamanan dalam zona. Pengentasan kemiskinan melalui kearifan lokal dapat dilakukan dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat pedesaan. Kemudian pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam proses penanggulangan kemiskinan membutuhkan empat prinsip: kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan.

9. (Septiadi & Nursan, 2020) meneliti tentang “*Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi dan Kebijakan Pertanian*”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep dan perkembangan kemiskinan Indonesia dan menganalisis pengaruh indikator makroekonomi dan kebijakan pertanian terhadap pengentasan kemiskinan Indonesia. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara umum tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan, tetapi terus mengalami perlambatan. Kemiskinan juga diiringi oleh fenomena ketimpangan pendapatan yang semakin melebar sehingga menyulitkan penduduk yang sangat miskin untuk lepas dari kemiskinan. Indikator makroekonomi meliputi variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah untuk infrastruktur, inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan. Faktor kebijakan pertanian yang terdiri dari variabel produksi beras memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan, sedangkan variabel total impor beras tidak berpengaruh nyata terhadap variabel kemiskinan.
10. (Sopah, Fidianing et al., 2020) meneliti tentang “*Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo*”. Penelitian berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 tahun 2016 pasal 14 pada poin C yakni pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14 poin C yakni pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

berdasarkan teori Marilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14 poin C yang merupakan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM “1000 Wirausaha Baru” kurang berhasil dilaksanakan, diukur berdasarkan teori Marilee S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Rujukan pada penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas, menganalisis terkait dengan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia berpacu pada kebijakan yang sifatnya sentralistik, dimana kebijakan berasal dari pusat kemudian diturunkan dan dilaksanakan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, rujukan penelitian yang ada merupakan analisis dan identifikasi penanganan kemiskinan di daerah di Indonesia.

Kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia yang bersifat sentralistik tersebut seringkali tidak melihat pola kemiskinan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, sehingga dalam implementasinya seringkali tidak berhasil. Kabupaten Bantul menjadi lokus penelitian ini karena angka kemiskinan di Kabupaten Bantul menjadi jumlah kemiskinan yang tertinggi di wilayah D.I.Yogyakarta sesuai data yang ada. Selain itu, penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kemiskinan di Kabupaten Bantul masih sedikit dilakukan. Letak persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang penanganan kemiskinan, perbedaannya adalah penelitian ini akan mengkaji

terkait implementasi kebijakan serta indikator keberhasilan melalui analisis *policy output* dan *policy outcomes* untuk mengetahui pola penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Harapannya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi *policy* sehingga mampu memberikan kebijakan sesuai dengan penyebab atau pola kemiskinan di Kabupaten Bantul untuk implementasi kebijakannya.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari indikator *policy output* meliputi cakupan, bias, akses, dan kesesuaian program dengan kebutuhan.
2. Indikator keberhasilan penerapan kebijakan dilihat dari indikator *policy outcomes* yaitu *initial outcome* atau dampak awal dari implementasi kebijakan.
3. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

D. Rumusan Masalah

Agar pembahasan benar-benar tertuju pada pokok permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan analisis terhadap penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Dari tujuan tersebut dapat dimaknai bahwa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara akademis terhadap pengetahuan ilmiah dalam studi pemerintahan dan kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam penerapan kebijakan penanganan kemiskinan khususnya di Kabupaten Bantul. Demikian juga penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi otoritas dan *stakeholder* dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya.

F. Kerangka Konsep

1. Pemerintah dan Pemerintahan

1) Pemerintah

Pemerintah atau "*government*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*The authoritative direction and administration of the affairs of men or women in a nation, state, city, etc*". Artinya pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara: negara bagian, kota, dan sebagainya. Bisa juga berarti *the governing body of a nation, state, city, etc* artinya lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, kota dan sebagainya (Budiman, M.Nasir, Muji Mulia, 2018). Secara etimologi, pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

Sedangkan berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara (Kurniawan, 2021).

Pemerintah dalam masyarakat yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekadar menyelenggarakan melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” untuk memberikan distribusi dan proteksi kepada warga, sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Teori pemerintah yang efektif juga harus mengakui peran pemerintah dalam meningkatkan tuntutan rakyat dan kapasitas sipil yang efektif. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan bersyarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela menurut Margaret Levi, dalam (Eko, 2021).

2) Pemerintahan

Menurut Suradinata dalam (Rusfiana, Yudi & Supriatna, 2021), pemerintahan terdapat dua pengertian yaitu pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh kegiatan pemerintah (badan publik atau pemerintah) baik yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan berkaitan erat dengan kewenangan pihak badan publik yang terpercaya untuk menyelenggarakan fungsi dalam urusan pemerintahan kepada pihak lainnya yaitu usaha swasta dan masyarakat

atas dasar hubungan timbale balik secara fungsional dalam mencapai tujuan negara.

Definisi pemerintahan yang menonjolkan aspek aktivitas atau kegiatan dapat dilihat dari pendapat para ahli pemerintahan berikut ini. Oliver P. Field, Pressly S. Sikes dan John E. Stoner (1949) mengatakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan dari pada negara. Selanjutnya Amrah Muslimin mengatakan pemerintahan suatu negara adalah cara mengendalikan negara tersebut untuk mencapai tujuannya. Sedangkan S.L.S. Danurejo (1998) menjelaskan lebih detail mengenai tujuan negara di dalam definisi pemerintahannya. Menurut Danurejo, pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuan. Tujuan itu tergantung pada tipe yang melekat pada negara tersebut. Andaikata suatu negara bertipe negara kemakmuran, maka segala daya upaya negara itu bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran bagi warganya (Sampe, 2022).

Menurut (Eko, 2021), Pemerintahan merupakan tradisi alamiah ras manusia ketika manusia bermasyarakat membentuk komunitas, desa, kerajaan atau negara-bangsa. Dunia, negara, kerajaan, daerah, desa, komunitas adat dapat disebut sebagai arena pemerintahan. Meskipun manusia sebagai makhluk yang kompleks, tetapi makhluk politik adalah unsur pertama pembentuk pemerintahan dalam pergaulan hidup bersama. Gejalanya dapat diamati dengan jelas, yakni munculnya pemangku, pengurus, atau penguasa yang mengatur dan mengurus

kepentingan bersama. Ia memerintah kehidupan biologis, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat manusia.

Pemerintahan adalah perkara siapa memerintah apa dan siapa, bagaimana serta di mana. Dalam memahami “siapa” sebagai subjek yang memerintah perlu dipahami melalui idealisme dan realisme. Menurut idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa siapa yang memerintah tidak mesti pemerintah, tetapi secara de facto yang memerintah ada banyak subjek seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat.

2. Kebijakan Publik

1) Penyusunan Kebijakan

Dalam konsep teori kebijakan publik, dijelaskan bahwa pemerintah merancang kebijakan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Menurut Price dalam (Wahab, 2014) proses penyusunan kebijakan yang bertanggungjawab adalah proses yang melibatkan interaksi antara ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator, dan para politisi.

Proses kebijakan selalu membuka kemungkinan adanya perbedaan antara harapan atau rencana pembuat kebijakan dengan hasil nyata yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Meskipun implementasi kebijakan merupakan aspek penting, baru belakangan ini

para ilmuwan sosial mulai memberikan perhatian pada masalah implementasi dalam proses kebijakan. Kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan menyebabkan adanya "mata rantai yang hilang" antara tahap perumusan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini baru sebatas mampu mengesahkan kebijakan tanpa sepenuhnya mampu memastikan bahwa kebijakan yang disahkan benar-benar membawa dampak atau perubahan yang diinginkan (Wahab, 2014).

Proses penyusunan kebijakan memerlukan tanggungjawab yang tinggi dan juga kemauan (*political will*) untuk mengambil inisiatif dan risiko. Oleh karena itu, para ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan menjadi beberapa tahapan. Tahapan penyusunan kebijakan publik menurut (Dunn, 2000), sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Pada tahapan ini masalah disaring dan dipilih mana yang pantas untuk diagendakan menjadi masalah publik, masalah yang sangat urgent harus masuk menjadi prioritas.

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat kemudian merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan tersebut melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

c. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif dan kesepakatan diantaranya dari direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diputuskan kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, serta yudikatif memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, ditentukan indikator-indikator atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

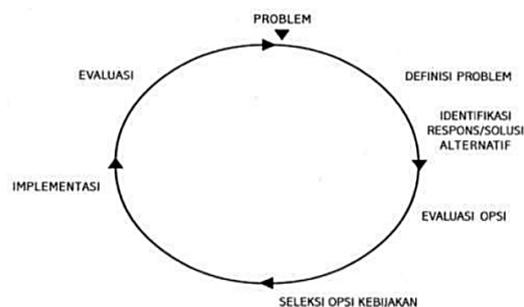
2) Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik baru terasa keberadaannya setelah diterapkan kepada masyarakat. Tahap implementasi menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil akhir. Proses pelaksanaan kebijakan publik memerlukan waktu yang panjang sebelum masyarakat dapat merasakan dampaknya. Selama implementasi, ada aktor-aktor penting yang memainkan peran krusial, menentukan apakah kebijakan tersebut akan berhasil atau tidak. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasinya, sehingga masyarakat perlu berperan aktif dalam proses ini.

Menurut Thomas R. Dye dalam (Andhika, 2019), mengemukakan bahwa kebijakan adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum kebijakan memiliki makna yang cukup luas. Segala bentuk tindakan atau keputusan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah adalah kebijakan. Ketika suatu pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan untuk mengentaskan kemiskinan, berarti pemerintah telah mengambil suatu kebijakan.

Selain itu, Parson dalam (Timbuan, 2021) menjelaskan proses strategi sebagai suatu siklus yang disebut siklus hidup kebijakan. Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa proses kebijakan memang merupakan siklus dinamis yang terus berlanjut sesuai dengan keadaan dan perkembangan lingkungan di sekitarnya. Diawali dari adanya permasalahan (*problem*) kemudian dipilih alternatif langkah yang akan diambil, kemudian pilihan tersebut diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, langkah selanjutnya yaitu kebijakan akan di evaluasi. Dari hasil evaluasi, akan diperoleh informasi sejauh mana program atau kebijakan berimplikasi di masyarakat.

Gambar 1.2
Siklus Hidup Kebijakan



Sumber : Parson dalam Timbuan (2021)

Salah satu fenomena yang menarik di dalam proses implementasi kebijakan yaitu adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas (implementator) di tingkatan terendah. Secara konseptual, pejabat harus mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah saat mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan tersebut. Implementasi tidak hanya terkait dengan persoalan administratif melainkan juga mengkaji faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan publik (Pramono, 2020).

Fungsi implementasi, sebagaimana dijelaskan oleh Peter S.Cleaves (1980) dalam (Bawenti et al., 2019) implementasi itu mencakup “*a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps*”. Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah). Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup penciptaan *policy delivery systems* yang biasanya terdiri atas cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan, bisa mengalami kegagalan pada tahap implementasinya. Menurut Hogwood dan Gunn

yang dikutip oleh (Pramono, 2020), pengertian kegagalan kebijakan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Diperlukan indikator untuk dijadikan sebagai alat pengukuran keberhasilan kebijakan, maka diperlukan alat pengukur yang dapat digunakan untuk menjustifikasi berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Indikator yang digunakan dalam penelitian yang mendasari artikel ini adalah indikator *policy output* dan indikator *policy outcomes*.

Theodore Poister (2003) dalam *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*, membedakan *output* dan *outcome* sebagai berikut: “*Outputs represent what a program actually does, whereas outcomes are the results it produces*”.

a. Indikator *Policy Output*

Menurut Ripley (1985) dalam (Sururi, 2019), terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output*, yaitu: cakupan, bias, akses, frekuensi, *service delivery* (ketepatan layanan), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Peneliti memilih beberapa indikator yang relevan dengan fokus kajian ini untuk mencapai ketepatan pengukuran kinerja *policy output*. Indikator-indikator *policy output* yang dinilai relevan dengan kajian adalah 1) cakupan; 2) bias; 3) akses; dan 4) kesesuaian program dengan kebutuhan.

Berdasarkan *Policy Output* terdapat beberapa indikator yaitu:

a) Cakupan

Indikator cakupan digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau.

b) Bias

Indikator bias digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan kelompok sasaran pada keluaran kebijakan.

c) Akses

Indikator akses juga digunakan untuk mengetahui apakah implementor program tersebut mudah dikontak pada saat kelompok sasaran membutuhkan informasi terkait implementasi kebijakan.

d) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah keluaran kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

b. Indikator *Policy Outcomes*

Indikator *policy outcomes* digunakan untuk mengukur hasil implementasi suatu kebijakan. Menurut (Sururi, 2019), hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, dan lain-lain) menuju kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, lebih sehat, dan lain-lain). Indikator *policy outcomes* yang digunakan dalam penulisan ini adalah 1) *initial outcome* atau hasil awal dari keluaran

kebijakan, 2) *intermediate outcome* atau hasil jangka menengah, dan (3) *long-term outcome* atau hasil jangka panjang.

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan, terdapat indikator *policy outcomes* sebagai berikut:

a) *Initial Outcome*

Indikator *initial outcome* digunakan untuk mengetahui dampak awal yang terjadi pada kelompok sasaran.

b) *Intermediate Outcome*

Indikator *intermediate outcome* digunakan untuk mengetahui dampak jangka menengah yang terjadi setelah implementasi kebijakan. *Intermediate outcome* dapat terjadi setelah *initial outcome* tercapai.

c) *Long-Term Outcome*

Indikator *long-term outcome* digunakan untuk mengetahui dampak jangka panjang yang terjadi setelah menerima kebijakan. *Long-term outcome* ini tentu saja berdasarkan dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan.

3) Evaluasi Kebijakan

Menurut (Situmorang, 2016), evaluasi kebijakan bertujuan untuk menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan, serta untuk melihat apakah kebijakan tersebut pada akhirnya berdampak dengan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, evaluasi disebut sebagai aktivitas fungsional yang tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga di setiap tahap kebijakan. Proses evaluasi meliputi spesifikasi, pengukuran,

analisis, dan rekomendasi. Menurut James Anderson, seperti yang dikutip oleh Situmorang, terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan:

- a. Evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Evaluasi berfokus pada kinerja kebijakan, mengutamakan kejujuran dan efisiensi dalam implementasinya.
- c. Evaluasi kebijakan yang sistematis mencoba menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, serta penerima manfaatnya.

Menurut Edward A. Suchman, langkah-langkah evaluasi kebijakan meliputi: mengidentifikasi tujuan program, menganalisis masalah, mendeskripsikan dan menstandarisasi kegiatan, mengukur setiap tahap perubahan, menentukan penyebab perubahan, dan menetapkan indikator dampak. Dari enam langkah ini, identifikasi masalah dianggap paling krusial. Evaluasi bertujuan memberikan pemahaman tentang tujuan kebijakan, pelaksanaannya, dan dampaknya. Ada tiga elemen penting yang harus dilakukan evaluator dalam evaluasi, yaitu:

- a. Mendeskripsikan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.
- b. Mengevaluasi kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah sosial.

- c. Mengevaluasi konsekuensi kebijakan dalam bentuk reaksi terhadap tindakan pemerintah.

Dampak kebijakan memiliki lima dimensi, yaitu dampak pada masalah publik dan individu terkait, dampak pada kelompok lain di luar sasaran kebijakan, dampak pada kondisi saat ini dan masa depan, serta biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat. Proses evaluasi kebijakan menghadapi berbagai masalah karena melibatkan banyak kepentingan, sehingga kegagalan dalam menetapkan kriteria dapat menghambat proses ini. Menurut Anderson, masalah-masalah dalam evaluasi kebijakan meliputi:

- a. Ketidakpastian tujuan kebijakan yang berasal dari proses penetapan kebijakan.
- b. Kausalitas.
- c. Penyebaran dampak kebijakan yang mempengaruhi kelompok di luar sasaran utama.
- d. Sulitnya memperoleh data yang relevan, terutama statistik.
- e. Resistensi pejabat, di mana evaluator harus berpikir objektif.
- f. Evaluasi yang dapat mengurangi dampak sehingga kurang mendapat perhatian.

4. Kemiskinan

1) Konsep Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu

pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat (Triono & Warsita, 2019).

Dalam literatur banyak mendefinisikan tentang kemiskinan, namun pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga pengertian kemiskinan antara lain; kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat

yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Suryawati (2005) dalam (Muliza, 2022) menyatakan keluarga miskin adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: “1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan; 2) Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah; 3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja); 4) Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area); dan 5) Kurangnya kesempatan memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas komunikasi dan kesejahteraan sosial lainnya.”

Selanjutnya Menurut Chambers dalam (Adawiyah, 2020), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: *Pertama*, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. *Kedua*, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. *Ketiga*, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. *Keempat*, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan..

Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran (Fitri, *et al*, 2017). Sama halnya dengan BPS yang menggunakan teknik kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). (<https://bappeda.jogjaprovo.go.id>, diakses pada 13 Januari 2024).

Sedangkan pola penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendapatan. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaannya selama periode tertentu. Kedua adalah pendidikan. Kemiskinan diartikan juga sebagai kegagalan dalam pendidikan. Ketiga, kesehatan adalah aspek penting dari kesejahteraan manusia dan merupakan aset yang meningkatkan kapasitas individu. Selain itu, konsumsi (pengeluaran) adalah pemanfaatan barang atau jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi memiliki

pengaruh terhadap tingkat kemiskinan; semakin besar konsumsi, maka tingkat kemiskinan akan menurun (Auliah, 2019).

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika dalam (Wulandari et al., 2022), antara lain sebagai berikut: Pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan). Kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi). Ketiga, tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). Keempat, kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa. Kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Ketujuh, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Kedelapan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Kesembilan, ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat

yang juga harus dipenuhi, yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah, karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya (Wulandari et al., 2022).

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (Wulandari et al., 2022).

2) Program Penanganan Kemiskinan

Menurut (Suyanto, 2013) untuk menanggulangi kemiskinan, membangun kehidupan yang lebih baik, dan sekaligus mengeliminasi kesenjangan sosial dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan harus diakui tidaklah mudah. Secara konseptual perlu disadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan seyogyanya tidak dilakukan secara sepotong-potong, parsial dan hanya bersifat temporer. Dengan mengacu pada isu prioritas kemiskinan maka program-program

intervensi harus benar-benar komprehensif. Tidak berhenti di aspek ekonomi saja, tetapi juga perlu menyentuh perbaikan aspek-aspek moral.

Penanggulangan kemiskinan menurut (Suyanto, 2013) ada empat cara, diantaranya :

1. Untuk memberdayakan kegiatan produktif masyarakat miskin dan bagaimana meningkatkan posisi bargaining mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan sikap superordinasi, tak pelak prasyarat yang dibutuhkan selain kemudahan ekonomi yang benar-benar nyata. Kemudahan ekonomi yang dimaksud adalah kesempatan semakin terbukanya akses masyarakat miskin terhadap bentuk sumber permodalan dan pasar yang tidak dibayangkan dengan mendiskreditkan masyarakat miskin.
2. Meningkatkan peran lembaga-lembaga lokal dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Agar program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan maka prasyarat yang harus dibutuhkan adanya jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan dan harus di dukung oleh mekanisme kontrol yang kuat.
3. Perlunya perlindungan yang efektif bagi masyarakat miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan hanya sekedar kelemahan mental, tidak dimilikinya etos wirausaha atau faktor-faktor internal dari orang miskin itu sendiri. Namun demikian dengan menyadari bahwa program-program pemberdayaan yang dirancang sejak awal yang

bertumpu pada pranata lokal, berbasis pada komunitas setempat serta menempatkan masyarakat miskin itu sendiri sebagai subyek niscaya hasil akan lebih maksimal.

Percepatan pengentasan kemiskinan memerlukan tindakan strategis, komprehensif, dan berkelanjutan yang dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Untuk selanjutnya, pemantauan pelaksanaan program anti kemiskinan yang telah dan sedang berlangsung akan menjadi tugas yang sangat penting dan mendesak. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga tidak dihargainya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, serta diperlakukan berbeda dalam kehidupan yang bermartabat. Diakui bahwa masyarakat miskin memiliki hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya (Saribulan et al., 2023).

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian merujuk pada penggambaran yang detail dan mendalam terhadap suatu kondisi mengenai sesuatu yang terjadi dilapangan (Sutopo, 2002). Tipe studi kasus deskriptif menurut Bill Gillham (2000) memiliki kemampuan mendeskripsikan suatu fenomena secara lengkap dan komprehensif beserta konteks permasalahan yang melingkupinya.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena berkaitan dengan fenomena mengenai kejadian telah dirasakan oleh subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, tindakan, perilaku dan sebagainya, yang dituangkan secara deskripsi dalam bentuk kalimat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peranan penting untuk melakukan pendekatan secara utuh kepada subjek penelitian sehingga dapat memperoleh data secara empiris dan ditekankan pada sebuah makna daripada menggeneralisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami beragam isu dan mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang didasarkan pada upaya membangun pandangan secara rinci yang dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit serta tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2014). Eksplorasi secara menyeluruh dan identifikasi terhadap variabel-variabel

yang mempengaruhi sebuah permasalahan menjadi fokus penting dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan upaya tersebut, penelitian ini kemudian memberikan alternatif perencanaan bagi *stakeholder*, instansi resmi, dan aktor lokal terkait lainnya. Metode penelitian deskriptif berfokus pada pemecahan masalah yang saat ini terjadi dengan mengumpulkan data atau fakta kemudian diuraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan (Bungin, 2015). Pemilihan metode ini diharapkan dapat menjelaskan tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bantul, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan pertimbangan *policy-maker* dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Secara keseluruhan data-data yang peneliti butuhkan akan berkembang sesuai dengan kondisi dan daya analisis peneliti. Data-data dan dokumen tersebut digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis.

Tabel 2.1
Jenis Data, Informan dan Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian	Informan/Narasumber/ Sumber Data	Metode Penelitian
Informasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul	1. Bupati Bantul 2. Ketua DPRD Bantul 3. Bappeda Bantul 4. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bantul	Dokumentasi dan <i>in-depth interview</i>
Indikator Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan (<i>policy output</i> dan <i>policy outcomes</i>).	1. Bupati Bantul 2. Bappeda Bantul 3. Dinas Sosial Kabupaten Bantul 4. Ketua TKPK Bantul 5. Penerima Manfaat atas Kebijakan	Dokumentasi dan <i>in-depth interview</i>

Sumber: Data diolah, 2024

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian sekaligus untuk menjamin keberhasilan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- 1) Sumber Data Primer. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung.
- 2) Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi beberapa cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat dibagi atas data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh berupa informasi baik tertulis maupun tidak yang berasal dari informan utama maupun sumber lainnya yang

memahami permasalahan kemiskinan di Bantul dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Data primer penelitian ini diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara langsung atau wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan faktor kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan penanganan kemiskinan dan sasaran penerima kebijakan tersebut. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2016), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Wawancara dilakukan dengan alat bantu berupa pedoman wawancara yang digunakan pada saat tatap muka secara langsung dan dengan alat bantu rekaman suara.

Data sekunder pada penelitian ini merupakan dokumen yang diperoleh dari buku, jurnal atau artikel maupun dokumen dari instansi yang berkaitan langsung. Dokumen yang diperoleh digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan, mengelola, dan menginterpretasikan informasi yang didapat melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan telaah literatur dengan uraian berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan atau menjelaskan pandangan informan penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan kemiskinan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan

mendalam (*in-depth interview*) dengan para *stakeholder* dan informan pendukung lainnya. Dengan tatap muka secara langsung, peneliti dapat mengamati, menyelidiki dan menjamin kejelasan informasi berdasarkan pengalaman personal. Peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur agar pembicaraan tidak kaku namun tetap terarah. Wawancara sejenis ini memungkinkan penemuan yang lebih mendalam dan fleksibel.

Wawancara semiterstruktur merupakan sebuah upaya pengumpulan data melalui interaksi antara peneliti dengan para informan yang memungkinkan penggalian informasi secara mendalam mengenai fenomena yang ada di lapangan (Bryman, 2016). Teknik tersebut digunakan peneliti agar memperoleh data berupa persepsi, asumsi, opini, pengalaman dan pengakuan yang langsung dialami *stakeholder* dan informan lainnya. Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pemilihan informan secara *purposive*, yaitu menentukan informan menggunakan pertimbangan khusus yang layak untuk dijadikan sampel. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria. Penentuan informan berdasarkan kriteria dilakukan dengan meninjau kembali dan mengkaji semua kasus yang cocok dengan suatu kriteria penting yang sudah ditentukan sebelumnya (Patton, 2009). Adapun informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Informan merupakan perumus serta pelaksana kebijakan.
2. Informan merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bantul.

3. Informan merupakan bagian dari OPD yang bersinggungan langsung terhadap program penanggulangan kemiskinan.
4. Informan merupakan masyarakat yang menerima dampak secara langsung terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Berikut adalah informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, antara lain:

1. H. Abdul Halim Muslih, selaku Bupati Bantul periode 2021-2024 sebagai pelaksana kebijakan atau dalam hal ini penanggung jawab program penanggulangan kemiskinan. Riwayat jabatan sebelumnya pada periode 2016-2016 sebagai Wakil Bupati Bantul, tahun 2004-2009 sebagai anggota DPRD DIY, dan saat ini juga menduduki jabatan sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Juni 2024 di ruang kerja bupati.
2. Joko B. Purnomo, selaku Wakil Bupati Bantul periode 2021-2024 yang secara *ex-officio* menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bantul. Riwayat jabatan sebelumnya pada periode tahun 2019-2021, 2014-2019, 2009-2014 menjabat sebagai DPRD DIY, periode tahun 2004-2009 dan 1999-2004 menjabat sebagai DPRD Kabupaten Bantul, serta saat ini juga menduduki jabatan sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Juni 2024 di rumah dinas wakil bupati.
3. H. Hanung Raharjo, S.T., selaku Ketua DPRD Kabupaten Bantul periode 2019-2024 sebagai legislator atau perumus kebijakan. Riwayat

jabatan sebelumnya pada periode tahun 2014-2019 juga menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bantul, dan saat ini juga menduduki jabatan sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024 di rumah pribadinya.

4. Nur Indah Isnaeni, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Bantul. Menjabat di Bappeda Kabupaten Bantul sejak tahun 2019 dengan beberapa jabatan sebelumnya yaitu Kabid Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan Bappeda serta Kabid Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024 di ruang kerjanya.
5. Andreas Deddy Eko Nugroho, S.I.P., selaku Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024 di ruang kerjanya.
6. Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dinas sosial merupakan salah satu OPD yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan khususnya bidang data dan perlindungan sosial. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024 di ruang kerjanya.
7. Perwakilan keluarga penerima manfaat dari program kebijakan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Terdapat beberapa sampel KPM yakni Sogiran selaku penerima bantuan RTLH tahun 2022, Sujiyanti Diah Lestari selaku penerima program pelatihan

menjahit, Slamet Mujahidin selaku penerima program jaminan kesehatan daerah, dan Dolah Painah selaku penerima program boga sehat. Wawancara dilakukan pada tanggal 07-12 Mei 2024 di rumah pribadinya.

2. Observasi

Teknik lain yang turut digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang perlu bagi penelitian ini adalah observasi. Pelaksanaan observasi peneliti dilakukan untuk mempelajari dan memaknai setiap perilaku manusia yang terlibat maupun berpartisipasi secara penuh. Teknik observasi dilakukan agar dapat mengamati secara langsung tentang sikap individu. Observasi merupakan teknik pengambilan data dan informasi melalui pengamatan secara sistematis kepada artefak, teks, dan orang (Bryman, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada kondisi lokasi di Kabupaten Bantul maupun layanan atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 06-31 Mei 2024 dengan melihat secara langsung hasil kebijakan maupun proses penyusunan kebijakannya melalui dokumen yang telah dihasilkan.

3. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan teknik mengumpulkan data dimana diperoleh melalui dokumen maupun mencatat data yang sudah ada. Dokumen tersebut berwujud tulisan, gambar maupun karya monumental dari individu. Dokumentasi dapat dikatakan untuk melengkapi metode

observasi maupun wawancara dalam penelitian kualitatif, yakni mengumpulkan data dari pihak terkait baik berupa catatan, arsip, gambar, dan dokumen lainnya (Sugiyono, 2016).

Pengumpulan Data pada kajian dokumen dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kajian dokumen secara langsung yaitu peneliti mengkaji dokumen data RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, kemudian Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul dari BPS Kabupaten Bantul tahun 2023. Dokumen langsung lainnya yaitu data pengguna tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul berdasarkan BPS yang diperoleh dari arsip atau website BPS. Selain itu, kajian dokumen yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui Jurnal, website pemerintah, media online, artikel dan buku yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Data dokumen dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019 – 2023
- 2) Jumlah Kalurahan, Padukuhan, dan Luas Kapanewon di Kabupaten Bantul
- 3) Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kapanewon;
- 4) Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018-2022
- 5) Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
- 6) Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan OPD
- 7) Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial SIDAMESRA
- 8) Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022
- 9) Daftar CSR Kabupaten Bantul

10) Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Daerah dan target Tahun
2021 – 2026 Kabupaten Bantul

11) Pencapaian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2022

D. Validasi Data

Uji validitas diperlukan untuk menjamin kredibilitas data yang telah dikumpulkan peneliti dalam setiap penelitian. Validasi data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Cresswell, 2017), validasi digunakan sebagai upaya untuk menilai ketepatan dari beragam temuan yang dilakukan oleh peneliti. Teknik validasi yang digunakan menerapkan sistem triangulasi, dimana peneliti menggunakan beragam informan dan sumber data yang didapat sebagai bukti penguat (Cresswell, 2017). Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber untuk menguji validitas. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang absah dengan mengandalkan metode ganda. Pada penelitian ini uji validitas data dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara dari informan kepada informan lainnya. Selain itu uji validitas data juga dilakukan dengan mengkonfirmasi data dokumentasi maupun observasi kepada informan yang terkait.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan peneliti melalui proses pengumpulan data baik primer maupun sekunder, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atas masalah penelitian. (Cresswell, 2017) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan terus menerus dan sering disebut dengan lingkaran analisis data. Proses tersebut dibagi menjadi 5 (lima) sub-proses yang saling terkait, yaitu manajemen data, meliputi olah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis; pembacaan dan

membuat memo; deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data; serta menyajikan dan memvisualisasikan data.

Data yang telah diperoleh dari beberapa *stakeholder* pada penelitian ini kemudian dikelompokkan ke dalam indikator *policy output* dan *policy outcomes*. Hasil pengumpulan data di lapangan kemudian dianalisis menggunakan alat analisis implementasi kebijakan menurut (Poister, 2003), *policy output* pada penelitian ini mencakup beragam indikator yang meliputi 1) cakupan; 2) bias; 3) akses; dan 4) kesesuaian program dengan kebutuhan. Sementara *policy outcomes* mengacu pada indikator *initial outcomes*. Berdasarkan identifikasi terhadap *policy output* dan *policy outcomes*, maka dapat dipahami elemen keberhasilan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Strategi dalam penelitian ini disusun dengan pendekatan tahapan penyelidikan (*inquire*) yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi sumber. Wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan *interview guide* (terlampir) yang berisi pertanyaan-pertanyaan berbasis analisis *policy output* dan *policy outcomes* guna memperoleh data-data dengan tema penelitian yang telah dijelaskan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Matriks Policy Output dan Policy Outcomes

Indikator	Indikator Pengukuran
<i>Policy Output</i>	1) Cakupan, 2) Bias, 3) Akses, 4) Kesesuaian program dengan kebutuhan.
<i>Policy Outcomes</i>	1) <i>initial outcome</i> atau hasil awal dari keluaran kebijakan, 2) <i>intermediate outcome</i> atau hasil jangka menengah, dan 3) <i>long-term outcome</i> atau hasil jangka panjang.

Sumber: Peneliti (Data diolah, 2024)

Hasil analisis implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan memperhatikan elemen indikator-indikator dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan matriks tersebut, maka dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator *policy output*, meliputi cakupan, bias, akses, kesesuaian program dengan kebutuhan.
2. Indikator *policy outcomes*, meliputi *initial outcome* atau hasil awal dari keluaran kebijakan, *intermediate outcome* atau hasil jangka menengah, dan *long-term outcome* atau hasil jangka panjang.

Indikator *policy outcomes* dalam penelitian ini hanya akan dikaji salah satu indikator saja, yakni *initial outcome* atau hasil jangka pendek. Hal ini dikarenakan durasi penelitian yang terbatas pada waktu sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti keseluruhan indikator.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bab 4 dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, *pertama* menjelaskan mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Bagian *kedua* mengenai, analisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul menggunakan alat analisis yaitu indikator *policy output*, meliputi cakupan, bias, akses, kesesuaian program dengan kebutuhan, serta indikator *policy outcomes* dalam penelitian ini hanya akan dikaji salah satu indikator saja, yakni *initial outcome* atau hasil jangka pendek.

A. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bantul masih menjadi agenda prioritas Kabupaten Bantul. Pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan antara 0,5-0,8%. Capaian tingkat kemiskinan penduduk Bantul dalam kurun waktu dua puluh tahun cenderung menurun, namun masih pada angka dua digit. Hal ini menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi yang besar dari berbagai stakeholder untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul meskipun selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, namun pada tahun 2023 persentase angkanya masih lebih tinggi dibanding DIY dan nasional. Bahkan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 2,5 %, padahal pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mencapai nol persen.

Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengadopsi berbagai strategi dan program untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara yang holistik dan berkelanjutan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017, sebagai landasan hukum yang kuat bagi Kabupaten Bantul dalam mengatur strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan dan program, Kabupaten Bantul dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan ekonomi lokal, strategi penanggulanga kemiskinan ini mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan diberikan melalui akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan untuk membantu masyarakat miskin mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan keluarga. Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama di Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya pada 1 (satu) OPD saja, karena setiap OPD memiliki bagian dan tanggung jawab pada program penanggulangan kemiskinan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA. (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Dinas Sosial Bantul) yang menyampaikan bahwa:

“leading sektornya untuk penanggulangan kemiskinan itu sebetulnya bukan dinas sosial saja tapi Bappeda. Bappeda lalu mengintegrasikan semua OPD karena tidak bisa yang namanya kemiskinan itu dibebankan pada satu OPD saja. Di Bantul itu kan ada namanya TKPK ya mulai dari pusat itu diketuai oleh Pak Wapres kemudian di Provinsi oleh pak Wagub, dan di kabupaten itu kan ketuanya pak wakil bupati kemudian sekretarisnya di Bappeda kemudian anggota-anggotanya OPD, atau sektor-sektor terkait.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melibatkan serangkaian strategi dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal atau daerah. OPD biasanya memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaan programnya, terkadang OPD sudah mempunyai teraget sasaran sendiri sehingga tidak melihat aspek kebutuhan dan kapasitas penerima program. Praktek seperti ini yang membuat pelaksanaan program kurang berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Joko B. Purnomo selaku ketua TKPK Kabupaten Bantul dalam wawancara sebagai berikut:

“Kelemahannya kita ini tak sampaikan fair saja, yang pertama pemerintah kabupaten khususnya di beberapa OPD itu sudah punya subyek untuk diberikan program, sehingga ada orang mengatakan nek ono program opo sek ngelola lembagane kelompok masyarakatnya itu-itu terus, sehingga itu kurang bermanfaat untuk kepentingan pengentasan kemiskinan. Yang kedua terkadang ketika program itu gagal tidak didiskusikan, sek penting anggarane rampung, SPJ lancar” (Wawancara pada tanggal 03 Juni 2024)

Selain program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menginisiasi beberapa sistem informasi atau *big data* untuk membantu implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Melalui sistem informasi berupa SIDAMESRA (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera), SIDAKIS (Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat), serta SEMAKIN (Sistem Monitoring Penganggulan Kemiskinan), membantu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal penyediaan akurasi data. Selain itu, untuk memberikan fasilitas atau kemudahan bagi masyarakat untuk medapatkan layanan bantuan, misalnya melalui sistem SIDAKIS (Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat).

Masing-masing sistem informasi tersebut memiliki kegunaannya. Adapun hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SIDAMESRA (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera)

Data menjadi elemen kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, risiko program-program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran sangat besar. Sejauh ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menjadi institusi yang secara tahunan menyediakan data angka kemiskinan di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Namun, data yang disediakan bersifat agregat, yang berarti tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik penduduk miskin berdasarkan nama dan alamat mereka.

Untuk memperoleh data tingkat individu, kabupaten/kota selama ini bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data DTKS ini kemudian diuraikan untuk digunakan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Namun, sejak tahun 2022 akses terhadap data *by name by adress* nya dari DTKS yang disediakan oleh Kementerian Sosial menjadi sulit karena berbagai alasan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi kabupaten/kota untuk merinci data individu sebagai penjelasan dari data keseluruhan yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Tentu saja, hal ini berdampak pada efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Selain DTKS, data lain yang dikumpulkan dan didanai oleh pemerintah pusat juga tidak dapat diakses oleh pemerintah kabupaten/kota, yang membuat para pemangku kepentingan menghadapi kesulitan dalam

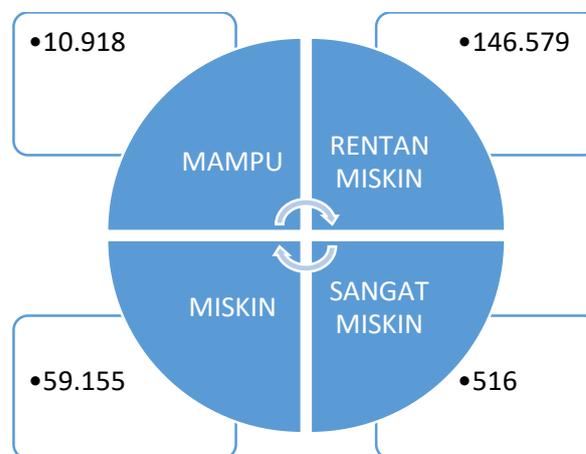
menetapkan dan mengevaluasi sasaran program, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Menghadapi tantangan yang dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2022, Kabupaten Bantul memulai proyek untuk mengembangkan sebuah aplikasi digital yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi ini diberi nama "Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera" (SIDAMESRA).

Dalam aplikasi SIDAMESRA, setiap penduduk Bantul akan dinilai berdasarkan status kesejahteraan sosialnya menggunakan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul. Melalui penilaian ini, status kesejahteraan sosial dapat diperingkat, memungkinkan identifikasi calon penerima program penanggulangan kemiskinan serta evaluasi pelaksanaan program dan data kemiskinan yang disampaikan oleh BPS. Harapannya, aplikasi ini akan mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut.

Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) merupakan alat untuk mengukur Tingkat Kesejahteraan Sosial di Masyarakat. Kriteria Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) merupakan kolaborasi dari Permensos No 3 Tahun 2021, Indikator BPS dan Kearifan Lokal. Adapun kriteria IKS meliputi: 1) Sumber Penghasilan, 2) Sandang, 3) Pangan, 4) Pendidikan, 5) Perumahan, 6) Kesehatan, 7) Kepemilikan Aset. Tujuan dari adanya Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) yaitu agar seluruh warga Bantul dapat terdata status sosialnya. Di dalam aplikasi SIDAMESRA ini terdapat peringkat kesejahteraan sosial, sehingga memudahkan dalam menentukan kebijakan penanganan masalah sosial dan lebih jelas dalam updating data

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Output data IKS ini dibagi ke dalam empat kategori, yaitu skor 22-43 kategori sangat miskin; skor 44-65 kategori miskin; skor 66-86 kategori rawan miskin; dan skor 87-108 kategori mampu.

Berdasarkan pengukuran menggunakan Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) pada SIDAMESRA, maka ditemukan hasil persentase status kemiskinan di Kabupaten Bantul sebagai berikut:



Adapun sebaran capaian pendataan IKS di setiap Kalurahan berbeda-beda karena kembali lagi pada kemampuan serta komitmen dari pemangku wilayah setempat. Hal ini disampaikan oleh Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Dinas Sosial Bantul:

“Jadi, sebetulnya data SIDAMESRA ini target kita 100% di tahun 2023 kemarin, tapi karena pendataan itu juga membutuhkan effort yang sangat besar. Karena pemda itu secara anggaran tidak mampu, sehingga kemarin sharing anggaran dari dinas sosial seksi saya waktu itu kemudian beberapa kalurahan yang punya kemampuan ekonomi lebih itu bisa juga mengadakan sendiri nah itu harapannya di akhir tahun kemarin targetnya 100%, tapi sekali lagi itu kembali pada komitmen pemangku wilayah.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

Berikut ini sebaran capaian IKS di masing-masing Kalurahan mulai dari tertinggi hingga terendah dapat dilihat pada tabel:

1) Kalurahan dengan Capaian IKS SIDAMESRA tertinggi

Tabel 4.1
Capaian IKS SIDAMESRA Tertinggi

Wilayah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	POPULASI KEPENDUDUKAN DALAM KK	CAPAIAN %	REKAP PERSENTASE IKS
	KK aplikasi	Jiwa aplikasi	KK realisasi	Jiwa realisasi			
002. SRIHARJO	3.438	9.518	3.438	9.518	3.474	99,0	peringkat 80 - 99,0
007. INOGIRI	1.486	4.186	1.486	4.186	1.515	98,1	peringkat 80 - 99,0
006. KARANGTALUN	1.127	2.951	1.127	2.951	1.181	95,4	peringkat 80 - 99,0
001. MANGUNAN	1.587	4.947	1.584	4.938	1.667	95,0	peringkat 80 - 99,0
003. KEBON AGUNG	1.311	3.742	1.311	3.742	1.413	92,8	peringkat 80 - 99,0
002. MUNTUK	2.937	8.387	2.931	8.378	3.161	92,7	peringkat 80 - 99,0
005. TIRTOMULYO	2.395	6.628	2.394	6.623	2.590	92,4	peringkat 80 - 99,0
004. KARANG TENGAH	1.780	5.179	1.780	5.179	1.938	91,8	peringkat 80 - 99,0
005. JATIMULYO	2.303	6.765	2.301	6.759	2.521	91,3	peringkat 80 - 99,0
001. SELOPAMORO	4.930	13.971	4.918	13.962	5.406	91,0	peringkat 80 - 99,0
008. WUKIRSARI	5.791	16.943	5.776	16.931	6.352	90,9	peringkat 80 - 99,0
005. GIRIREJO	1.567	4.515	1.567	4.515	1.735	90,3	peringkat 80 - 99,0
002. SRIMULYO	5.875	16.728	5.863	16.725	6.499	90,2	peringkat 80 - 99,0
006. TERONG	1.880	5.280	1.872	5.270	2.089	89,6	peringkat 80 - 99,0
004. TRIMULYO	5.977	17.556	5.977	17.556	6.693	89,3	peringkat 80 - 99,0
002. MULYODADI	3.888	10.739	3.879	10.721	4.398	88,2	peringkat 80 - 99,0
002. CANDEN	3.932	11.113	3.928	11.109	4.472	87,8	peringkat 80 - 99,0
001. WONOKROMO	4.377	13.578	4.377	13.578	5.013	87,3	peringkat 80 - 99,0
002. TRIHARJO	4.157	11.867	4.150	11.851	4.762	87,1	peringkat 80 - 99,0
003. DLINGO	1.837	5.273	1.835	5.267	2.111	86,9	peringkat 80 - 99,0
001. TRIWIDADI	3.269	9.784	3.258	9.778	3.760	86,6	peringkat 80 - 99,0
003. SUMBERMULYO	5.131	14.332	5.131	14.332	5.963	86,0	peringkat 80 - 99,0
001. TIRTOHARGO	989	2.649	987	2.644	1.157	85,3	peringkat 80 - 99,0
003. DONOTIRTO	2.637	7.096	2.633	7.090	3.103	84,9	peringkat 80 - 99,0
002. PARANGTRITIS	2.413	6.803	2.400	6.793	2.843	84,4	peringkat 80 - 99,0
003. SEGOROYOSO	2.661	7.976	2.643	7.944	3.142	84,1	peringkat 80 - 99,0
003. SUMBER AGUNG	4.773	13.512	4.771	13.511	5.690	83,8	peringkat 80 - 99,0
001. PONCOSARI	3.968	11.137	3.965	11.133	4.749	83,5	peringkat 80 - 99,0
003. BANTUL	4.816	13.341	4.790	13.315	5.943	80,6	peringkat 80 - 99,0
002. PANJANGREJO	2.835	8.004	2.835	8.004	3.532	80,3	peringkat 80 - 99,0

Sumber: Dinas Sosial Bantul, 2024

2) Kalurahan dengan Capaian IKS SIDAMESRA Menengah

Tabel 4.2
Capaian IKS SIDAMESRA Menengah

Wilayah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	POPULASI KEPENDUDUKAN DALAM KK	CAPAIAN %	REKAP PERSENTASE IKS
	KK aplikasi	Jiwa aplikasi	KK realisasi	Jiwa realisasi			
001. TAMANAN	3.583	10.613	3.575	10.602	4.485	79,7	peringkat 50 - 79
002. GADINGHARJO	1.138	3.172	1.137	3.171	1.428	79,6	peringkat 50 - 79
003. SRIMARTANI	4.719	13.707	4.713	13.699	5.927	79,5	peringkat 50 - 79
003. SRHARDONO	4.157	11.687	4.148	11.687	5.290	78,4	peringkat 50 - 79
002. JAGALAN	867	2.339	867	2.339	1.130	76,7	peringkat 50 - 79
001. BANGUNJIWO	7.729	22.324	7.729	22.324	10.118	76,4	peringkat 50 - 79
001. SELOHARJO	3.128	9.040	3.119	9.023	4.115	75,8	peringkat 50 - 79
001. ARGODADI	3.135	8.710	3.130	8.709	4.214	74,3	peringkat 50 - 79
003. ARGOSARI	2.433	6.568	2.429	6.565	3.340	72,7	peringkat 50 - 79
005. WONOLELO	1.279	3.714	1.275	3.709	1.763	72,3	peringkat 50 - 79
003. SRIGADING	2.575	6.931	2.575	6.931	3.606	71,4	peringkat 50 - 79
003. GILANGHARJO	4.118	11.718	4.118	11.718	5.767	71,4	peringkat 50 - 79
004. TIRTOSARI	1.175	2.936	1.175	2.936	1.669	70,4	peringkat 50 - 79
001. SIDOMULYO	3.548	9.904	3.530	9.888	5.055	69,8	peringkat 50 - 79
002. TRIMURTI	4.510	12.842	4.506	12.838	6.479	69,5	peringkat 50 - 79
004. WIROKERTEN	3.442	10.569	3.438	10.563	4.945	69,5	peringkat 50 - 79
003. SINGOSAREN	904	2.744	903	2.744	1.348	67,0	peringkat 50 - 79
004. BAWURAN	1.522	4.373	1.517	4.371	2.301	65,9	peringkat 50 - 79
001. CATURHARJO	2.699	7.663	2.695	7.663	4.211	64,0	peringkat 50 - 79
001. PATALAN	2.835	7.877	2.831	7.870	4.494	63,0	peringkat 50 - 79
001. PENDOWOHARJO	5.103	14.945	5.098	14.929	8.113	62,8	peringkat 50 - 79
002. SENDANGSARI	2.648	7.888	2.646	7.886	4.281	61,8	peringkat 50 - 79
003. TAMANTIRTO	5.059	15.401	5.051	15.390	8.249	61,2	peringkat 50 - 79
003. GUWOSARI	2.855	8.353	2.853	8.351	4.813	59,3	peringkat 50 - 79
004. MURTI GADING	1.833	5.134	1.787	5.071	3.026	59,1	peringkat 50 - 79
004. TEMUWUH	1.525	4.231	1.521	4.227	2.690	56,5	peringkat 50 - 79
002. RINGIN HARJO	1.720	4.914	1.707	4.897	3.050	56,0	peringkat 50 - 79
004. TRIRENGGO	3.794	10.578	3.785	10.572	6.835	55,4	peringkat 50 - 79
002. TMBULHARJO	4.346	12.797	4.346	12.797	8.326	52,2	peringkat 50 - 79
004. WIJIREJO	2.088	5.844	2.079	5.839	4.106	50,6	peringkat 50 - 79

Sumber: Dinas Sosial Bantul, 2024

3) Kalurahan dengan Capaian IKS SIDAMESRA Terbawah

Tabel 4.3
Capaian IKS SIDAMESRA Terbawah

Wilayah	Jumlah		Jumlah		POPULASI KEPENDUDUKAN DALAM KK	CAPAIAN %	REKAP PERSENTASE IKS
	KK aplikasi	Jiwa aplikasi	KK realisasi	Jiwa realisasi			
002. TIRTONIRMOLO	3.926	11.646	3.922	11.645	8.292	47,3	peringkat 16 - 49
001. SITIMULYO	2.662	7.503	2.660	7.503	6.290	42,3	peringkat 16 - 49
003. BANGUNHARJO	4.034	11.217	3.937	11.176	9.318	42,3	peringkat 16 - 49
007. BATURETNO	2.461	7.029	2.450	7.017	5.834	42,0	peringkat 16 - 49
005. JAMBIDAN	1.498	4.455	1.495	4.455	3.631	41,2	peringkat 16 - 49
002. ARGOREJO	1.763	4.837	1.752	4.823	4.484	39,1	peringkat 16 - 49
004. ARGOMULYO	2.020	5.525	2.020	5.525	5.307	38,1	peringkat 16 - 49
006. POTORONO	1.596	4.763	1.591	4.762	4.684	34,0	peringkat 16 - 49
005. SABDODADI	773	2.153	769	2.142	2.579	29,8	peringkat 16 - 49
001. GADINGSARI	1.111	3.071	1.108	3.066	3.739	29,6	peringkat 16 - 49
004. PANGGUNGHARJO	2.576	7.634	2.575	7.634	10.133	25,4	peringkat 16 - 49
001. PALBAPANG	1.255	3.568	1.251	3.568	5.123	24,4	peringkat 16 - 49
004. NGESTIHARJO	2.461	7.310	2.450	7.295	10.718	22,9	peringkat 16 - 49
002. PLERET	1.050	2.922	1.043	2.909	4.709	22,1	peringkat 16 - 49
008. BANGUNTAPAN	2.203	6.515	2.198	6.513	13.365	16,4	peringkat 16 - 49

Sumber: Dinas Sosial Bantul, 2024

Pemanfaatan data IKS pada aplikasi SIDAMESRA digunakan sebagai dasar dalam:

- a. Memverifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada
- b. Memverifikasi data bantuan sosial yang sudah ada
- c. Pertimbangan untuk pengusulan data baru DTKS dan bantuan sosial
- d. Pemeringkatan kesejahteraan sosial warga

2. SIDAKIS (Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat)

SIDAKIS, singkatan dari Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat, adalah sebuah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk mengajukan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan ke program Kartu Indonesia Sehat dengan dana dari APBD. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan publik dan memperluas jangkauan jaminan kesehatan. Aplikasi SIDAKIS merupakan hasil inisiatif dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan Integra Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengembangan sistem yang luas dalam penanggulangan kemiskinan yang

sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama beberapa tahun untuk mendokumentasikan data kemiskinan.

Salah satu manfaat utama dari aplikasi SIDAKIS adalah memungkinkan pasien untuk langsung menuju rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis, sehingga diharapkan proses penanganannya lebih cepat dan dapat mengurangi risiko kematian. Dengan adanya SIDAKIS, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya transportasi yang sebelumnya diperlukan untuk pergi ke Dinas Sosial. Selain itu, baik pasien maupun rumah sakit dapat memiliki kepastian mengenai pembiayaan, yang membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan mencegah kemungkinan munculnya kemiskinan akut.

Pada saat ini, aplikasi SIDAKIS sudah tersedia untuk digunakan oleh 31 rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan kehadiran SIDAKIS, masyarakat yang memerlukan layanan jaminan kesehatan tidak perlu lagi mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Bantul secara langsung, melainkan cukup menghubungi penanggung jawab di bagian pendaftaran rumah sakit. Setelah itu, petugas rumah sakit akan mengajukan permohonan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari APBD melalui aplikasi SIDAKIS.

3. SEMAKIN (Sistem Monitoring Penganggulan Kemiskinan)

Program pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama pemerintah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Ada berbagai program yang diluncurkan untuk memastikan upaya ini tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih. Namun, karena pengelolaan data yang kompleks dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring dan

evaluasi (monev), diperlukan suatu aplikasi yang terintegrasi sebagai solusinya.

Sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan data dan informasi yang semakin meningkat, pada tahun 2017 sebuah aplikasi bernama SIMISKIN atas kerjasama dengan Universitas Digital Indonesia dibuat untuk memudahkan Bappeda dalam melakukan monitoring dan evaluasi tanpa harus melakukan kunjungan lapangan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan data dan informasi semakin kompleks, sehingga pada tahun 2020, SIMISKIN mengalami pengembangan menjadi SEMAKIN (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penambahan fitur spasial dan ketersediaan akses melalui playstore. SEMAKIN memungkinkan tampilan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintahan daerah secara bersamaan, menyediakan pemetaan yang rinci mengenai data warga miskin berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), menampilkan informasi mengenai bantuan apa saja yang diterima oleh setiap kepala keluarga, menerima masukan lokasi dan foto rumah keluarga miskin melalui aplikasi mobile yang kemudian disimpan langsung ke server, memfasilitasi pembaruan data pokok kemiskinan dengan mudah, serta dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi agregat mengenai kemiskinan secara umum.

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan, dan dijalankan secara terintegrasi dan

merata di seluruh wilayah. Beberapa capaian pembangunan yang berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan antara lain adalah: alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Sari, 2016). Salah satu faktor kunci dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran yang dapat dipercaya mengenai tingkat kemiskinan merupakan alat yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk memusatkan perhatian pada kondisi kehidupan orang miskin. Data kemiskinan yang baik memungkinkan evaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, perbandingan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu dan antar wilayah, serta penetapan target populasi miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Zatriandika, 2021).

B. Analisis Indikator *Policy Output* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Untuk mengukur sejauh mana implementasi berhasil, penting untuk melihat secara bersamaan hasil kebijakan yang dihasilkan dan dampaknya. Oleh karena itu, kinerja implementasi kebijakan kemiskinan di Kabupaten Bantul melibatkan penilaian terhadap indikator-indikator *policy output* dan *policy outcome*.

1. Indikator Cakupan

Dalam konteks ini, indikator cakupan dievaluasi berdasarkan seberapa luasnya kelompok sasaran yang telah terjangkau oleh kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian melalui *literatur review* dan wawancara, program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul

terbagi menjadi 3 (tiga) aspek strategi, yakni: (1) Program Pengurangan Beban, (2) Program Pemberdayaan Masyarakat, dan (3) Program peningkatan pendapatan atau penghasilan. Untuk mendukung strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian membuat parogram sistem informasi/*big data*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Galih selaku Kabid Pemberdayaan sosial/Dinas Sosial dalam wawancara sebagai berikut:

“Pada prinsipnya di kabupaten bantul itu mengacu juga pada strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Ada tiga pokoknya itu kan, yang pertama itu adalah pengurangan beban, kemudian yang kedua itu adalah peningkatan pendapatan atau peningkatan penghasilan, kemudian yang ketiga itu pengurangan kantong kemiskinan.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

Dalam wawancara dengan informan lain yaitu Andreas Deddy Eko Nugroho, S.I.P. dari Bappeda Bantul mengatakan bahwa:

“Kalau di kami, di Perda penanggulangan kemiskinan itu kan ada 5 strategi, kemudian digodog lagi jadi ada 3, yaitu pengurangan beban seperti bansos tadi, kemudian pemberdayaan warga miskin sebagai upaya pengurangan kantong kemiskinan, sama peningkatan pendapatan.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2024)

Pada setiap strategi memiliki berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Masing-masing program tersebut memiliki cakupan kelompok sasaran yang berbeda-beda. Pada aspek strategi program pemberdayaan dan program peningkatan pendapatan saling berkaitan satu sama lain, maka dalam penelitian ini akan dikaji secara bersamaan. Adapun jumlah kelompok target pada masing-masing bentuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pengurangan Beban

a. Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI adalah salah satu program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepesertaan PBI merupakan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan di bidang pembiayaan kesehatan. Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bantul tahun 2022 mencapai 96,37%.

b. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda adalah program bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Adapun pencapaian cakupan pada program tersebut yaitu:

Tabel 4.4
Cakupan Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda)

Jenis Layanan	Tahun	Cakupan
Rekomendasi pelayanan Jamkesda	31 Desember 2022	4.894 jiwa

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah rekomendasi pelayanan Jamkesda per 31 Desember 2022 berjumlah 4.894 jiwa. Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui UPT Jaminan Kesehatan Daerah untuk membantu memberikan jaminan kesehatan.

c. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos)

Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DIY melalui UPT Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu dan/atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memperoleh jaminan kesehatan.

d. Pemberian Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat bantu bagi PPKS. Program ini juga bekerjasama dengan dengan UPT Bapel Jamkesos, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan relawan dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu. Pada tahun 2022 total PPKS yang dipenuhi alat bantu sebanyak 140 orang.

Tabel 4.5
Cakupan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

Jenis Layanan	Tahun	Cakupan
Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	2022	140 orang

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2022

e. Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program ini diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan subsidi beras sejahtera (rastra), dan mulai

ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kabupaten/kota terpilih. Pada tahun 2022 terdapat 88.019 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bantul.

Tabel 4.6
Cakupan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Jenis Layanan	Tahun	Cakupan
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2022	88.19 Keluarga

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2022

f. Penerima Manfaat Boga Sehat

Sebagai komitmen dan *political will*, Pemerintah Kabupaten Bantul mengambil tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lansia dengan merilis program boga sehat pada tanggal 15 Februari 2019 melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Boga Sehat. Program Boga Sehat mengkategorikan penerima manfaat sebagai lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang memenuhi kriteria terlantar dan tidak memiliki mata pencaharian, termasuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS. Program ini juga ditujukan kepada individu dengan disabilitas berat yang bergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Penerima Boga Sehat Tahun 2022, sebanyak 900 orang lanjut usia dan penyandang disabilitas berat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Proses penentuan penerima dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Bantul melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di setiap kapanewon, dengan rekomendasi dari pihak kalurahan.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan program boga sehat yang tersebar di 11 kapanewon yang terdiri dari Kapanewon: Dlingo, Jetis, Imogiri, Pandak, Kasihan, Banguntapan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro dan Sedayu. Sejumlah 900 jiwa/penerima manfaat. Sedangkan, jumlah lansia terlantar pada Tahun 2021 di Kabupaten Bantul adalah 7.260 orang.

Tabel 4.7
Cakupan Penerima Manfaat Boga Sehat

Jenis Layanan	Jumlah Lansia Terlantar (2021)	Tahun Cakupan	Cakupan
Manfaat Boga Sehat	7260 orang	2022	900 Jiwa/penerima manfaat.

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2022

g. Program Jamban Sehat

Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan khususnya di bidang sanitasi dengan memberikan bantuan penyediaan sarana jamban yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2022 terdapat 70 KK penerima manfaat program ini.

h. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Bansos RTLH adalah pemberian bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna renovasi Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pada tahun 2022 terdapat 517 penerima manfaat program ini.

Tabel 4.8
Cakupan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Jenis Layanan	Cakupan Tahun 2022	Cakupan Tahun 2023
Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,733%	0,909%

Sumber: RLPPD Kabupaten Bantul, 2023

2) Program Pemberdayaan Masyarakat

a. Program Pelatihan

Program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Jenis pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan juru las, pelatihan meubelair, pelatihan budidaya tanaman dan buah-buahan, pelatihan penggunaan alat mesin pertanian, pelatihan bisnis online, pelatihan peningkatan kapasitas UMKM dan lain-lain. Jumlah peserta pelatihan adalah 2.747 orang dengan rincian peserta pelatihan Disnakertrans sejumlah 622 orang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sejumlah 290 orang dan DKUKMPP sejumlah 1.835 orang.

Gambar 4.1
Program Pelatihan



Sumber : Dokumentasi Disnakertrans Kabupaten Bantul, Buku Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

b. Program Padat Karya Infrastruktur

Kegiatan ini sebagai sarana dalam perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang masih menganggur atau setengah pengangguran, juga masyarakat miskin di sekitar lokasi kegiatan disamping untuk memberdayakan. Pada tahun anggaran 2022, padat karya infrastruktur dilaksanakan di 17 Kapanewon. Kabupaten Bantul memperoleh 158 paket/lokasi dari APBD dengan total serapan tenaga kerja 4.136 dan 116 paket/lokasi dari BKK Provinsi dengan total serapan tenaga kerja 6.032. Kegiatan padat karya infrastruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin. Hal ini juga disampaikan oleh Joko Purnomo selaku ketua TKPK Bantul dalam wawancara:

“kita membuat program kalau sekarang yang ngetren di Bantul salah satu programnya adalah padat karya dimana di dalamnya melibatkan unsur-unsur masyarakat miskin untuk dijadikan sebagai tenaga kerjanya dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka sehingga punya daya beli.”
(Wawancara pada tanggal 03 Juni 2024)

c. Program Transmigrasi

Pada tahun 2022 Kabupaten memperoleh kuota penempatan transmigrasi sebanyak 15 kepala keluarga terdiri dari 47 jiwa, dan sudah terpenuhi di lima lokasi penempatan yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Program transmigrasi ini dimaksudkan agar masyarakat yang mempunyai jiwa merantau difasilitasi untuk menempati daerah baru dengan dibekali pengetahuan, keterampilan, dan modal usaha, sehingga harapannya dapat membuka kehidupan baru yang lebih layak dan sejahtera.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan (PPBMP)

Program ini merupakan hasil dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode tahun 2021-2024. Kegiatan PPBMP diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat padukuhan, dengan biaya dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada kalurahan sebesar Rp50.000.000,- untuk setiap padukuhan. Ruang Lingkup serta prioritas sasaran penggunaan bantuan keuangan PPBMP merupakan kewenangan Kalurahan meliputi Bidang Pendidikan (PAUD), Bidang Kesehatan (Posyandu), dan Bidang Lingkungan (Sampah Rumah Tangga) dengan regulasi berupa Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankannya.

e. Program Lumbung Mataraman

Program ini dilaksanakan melalui pelatihan/bimtek dan hibah bibit dan alat-alat pertanian melalui anggaran khusus Dana Keistimewaan dengan sasaran Kelompok Wanita Tani. Pada tahun 2022 penerima kegiatan pengembangan Lumbung Mataraman tahun 2022 yaitu KWT Saka Lestari, Kalangan Bangunjiwo Kasihan Bantul, KWT Mugi Rahayu, Ngunan-Unan Srigading Sanden Bantul, KWT Suka Maju, Palihan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul, KWT Srikandhi, Mangiran Trimurti Srandakan Bantul, KWT Sido Makmur, Somokaton Sitimulyo Piyungan.

f. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani dengan memberikan bantuan sarana prasarana dan pasca panen kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani serta pendampingan penggunaan alat mesin pertanian. Pada tahun 2022 terdapat lima kelompok tani (KT) yang mendapatkan hibah alat pertanian yaitu KT Manunggal, KT Sedyo Makmur, KT Ngudi Laras, KT Sri Rejeki dan Gapoktan Intan Berseri. Bantuan yang diberikan berupa empat cultivator dan satu unit Combine Harvester.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan di Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan itu melalui setidaknya dua strategi. Pertama, pengurangan beban konsumsi, yang

kedua peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat. Maka dapat disajikan pada tabel sebagai berikut beserta dengan penerima manfaat dan alokasi anggaran.

Tabel 4.9
Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022

Program	Instansi	Tahun 2022	
		Jumlah KPM	Anggaran
Program Keluarga Harapan	Kemensos	56.845 KK	153.379.350.000
Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako Reguler	Kemensos	88.019 KK	119.095.600.000
Program Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	Kemensos	54.353 Jiwa	24.654.067.200
Program Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) (PBI APDB)	Dinas Kesehatan	64.874 Jiwa	10.121.486.356
Jambanisasi	Dinas Kesehatan, DIY	70 KK	350.000.000
Rehab Rumah Tidak Layak Huni/RTLH	DPU	517 KK	12.845.000.000
Pelathan Keterampilan BLK	Disnaker	430 Jiwa	1.757.882.410
Padat Karya	Disnaker	10.140 Jiwa	36.680.000.000
Boga Sehat	Dinas Sosial	900 KK	6.075.000.000
UEP Graduasi PKH Wirausaha	Dinas Sosial	103 KK	309.000.000
UEP Graduasi PKH Pengembangan	Dinas Sosial	105 KK	315.000.000

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul telah mencakup pada kelompok sasaran masing-masing sesuai dengan program tujuan penanggulangan kemiskinan. Program-program ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Bantul, namun juga menjadi tanggung jawab berbagai OPD di Kabupaten Bantul.

Penanggulangan kemiskinan diselesaikan oleh berbagai OPD, dalam hal ini Bappeda menjadi *leading sector* penanggulangan kemiskinan.

Bappeda merupakan OPD yang *superbody*, yang mengkoordinir seluruh OPD di dalam merancang kegiatannya karena penanggulangan kemiskinan kan tidak hanya di dinas sosial saja. Sehingga diperlukan kerjasama oleh seluruh OPD dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kebijakan kemiskinan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bupati Bantul dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi Bappeda ini menjadi leading sector penanggulangan kemiskinan. Bappeda ini kan OPD yang superbody, yang mengkoordinir seluruh OPD di dalam merancang kegiatannya karena penanggulangan kemiskinan kan tidak hanya di dinas sosial saja. Dinas-dinas rumpun ekonomi misalnya dinas pertanian, dinas kelautan dan perikanan, dinas perindagkop, dinas nakertrans, dinas pariwisata yang mereka punya sasaran programnya itu adalah diantaranya warga miskin.” (Wawancara pada tanggal 05 Juni 2024)

Program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul harus bersifat berkelanjutan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada, untuk mencari solusi strategis dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan fiskal di tingkat daerah, termasuk peningkatan anggaran dalam APBD Kabupaten Bantul, serta dana kemiskinan dari APBN, dapat mendukung masyarakat miskin melalui program-program produktif yang secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh H. Hanung Raharjo, S.T., selaku Ketua DPRD Bantul dalam wawancara:

“Hasil dari evaluasi kami dalam penanganan kemiskinan tersebut pasti kan setiap setengah tahunan ada evaluasi penggunaan anggaran. Kalau kita untuk penanggulangan kemiskinan yang itu murni penganggaran di APBD mungkin kecil ya, tapi ketika berbiara makronya untuk dalam rangka percepatan perekonomian, penguatan UMKM, dan sebagainya saya kira itu hampir di angka 30%. Anggaran kita itu hampir 50% buat gaji pegawai, sisanya itu paling berkurang dari infrastruktur, tapi infrastruktur sebenarnya juga menunjang juga seperti program padat karya dan RTLH.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2024)

TKPK Bantul dalam fungsi sebagai koordinator juga mengevaluasi program kebijakan yang ada sesuai dengan ketugasannya. Hal ini disampaikan oleh Joko B. Purnomo sebagai ketua TKPK Bantul dalam wawanara:

“Evaluasi ini dilakukan tidak harus melalui salah satu metodologi formal, tapi evaluasi ini kita fleksibel saja, seperti saya sebagai TKPK mungkin bisa setiap hari menelpon kepala dinas itu bisa dua atau tiga kali, mungkin dalam seminggu itu bisa setiap hari telpon kepala dinas, kenapa karena itu bagian dari bentuk bagaimana mengevaluasi program yang berjalan, perencanaan, dan sebagainya. Disitulah kemudian kita bisa melakukan sebuah evaluasi secara benar, terarah, terukur, tepat, akurat, jadi konsepnya itu.” (Wawancara pada tanggal 03 Juni 2024)

Kebijakan pendukung lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan selain yang telah ditetapkan dalam Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2017 adalah Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki MoU dengan forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bantul. Regulasi terkait kewajiban dunia usaha/perusahaan untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan juga terdapat dalam Pasal 9 Perda Nomor 6 Tahun 2017 yang berbunyi “Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban: a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

Langkah ini merupakan pendukung cakupan penanggulangan kemiskinan agar lebih luas menjangkau masyarakat di Kabupaten Bantul. Jika forum CSR ini betul-betul berkomitmen untuk memberikan tanggung jawab sosialnya melalui program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan sehingga kolaborasi ini dapat saling mendukung. Hal ini, sejalan dengan pernyataan Bupati Bantul dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

“Kami sudah punya Mou dengan forum CSR Bantul, itu forumnya para pengusaha menengah dan besar yang oleh undang-undang diwajibkan untuk mengalokasikan 5% dari keuntungan bersihnya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah mereka itu sering kita ajak koordinasi kemudian kita gunakan untuk program prioritas pemerintah, ada yang untuk penanggulangan masalah lingkungan, ada yang untuk penanggulangan kemiskinan misalnya membangun rumah tidak layak huni. Jadi pemanfaatan CSR itu dibawah koordinasi pemerintah Bantul.” (Wawancara pada tanggal 05 Juni 2024)

Perusahaan-perusahaan yang telah bergabung di forum CSR Bantul berada dalam naungan koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul selalu melakukan koordinasi dengan forum CSR dalam program-program prioritas, seperti untuk penanggulangan masalah lingkungan, ada yang untuk penanggulangan kemiskinan misalnya membangun rumah tidak layak huni. Forum CSR tersebut meliputi BUMN, lembaga keuangan nonBUMN, dan perusahaan umum seperti yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Daftar CSR Kabupaten Bantul

BUMN	Bank BRI Kanca Bantul
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	PT PLN
	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
	PT Angkasa Pura I
	PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta
Lembaga Keuangan/Non BUMN	Bank BPD DIY Cabang Bantul
	BMT ARTHA AMANAH SANDEN
	KSPPS BMT ASSALAM
	KSPPS BMT Mojo Bangun Sentosa
	KSPPS BMT Mitrama
	BMT Projo Artha Sejahtera
	KSPPS BMT Niti Tentrem Nugraha (NITEN)
	BMT Insan Sadar Usaha
	PT. BPR Bank Bantul
	Koperasi Simpan Pinjam Syariah An-Nahdlah
	KSPPS BMT AD Da'wah
	KSP Adil Yogyakarta
	KSPPS BMT El-BUMMI 381 Bantul
	Perusahaan Umum
Pamella Tiga Supermarket	
PT Sinar Kencana Makmurjaya	
PT Suradi Sejahtera Raya	
PT Indomarco	
Toserba dan Swalayan Purnama	
PT Ide Studi Indonesia	

	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari
	PT Bayu Utama
	PT Telkom
	Grand Rohan Jogja
	PT Produk Rekreasi (Kids Fun)
	PT Busana Remaja Agra Cipta
	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)
	CV JAWA CLASSIC AESTETICS
	Mulia Toserba Bantul
	Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia
	PT Busana Remaja Agracipta
	PT Out of Asia
	Rumah Sakit Santa Elisabeth
	ROS IN Hotel
	PTIGP Internasional Bantul
	PT Ameya Livingstyle Indonesia
	PT Anggun Kreasi Garmen
	RS PKU Muhammadiyah Bantul

Sumber: diolah peneliti, dari Bappeda 2023

Penguatan komunitas dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat menjadi prioritas dalam memastikan program-program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua penduduknya.

3) Program Sistem Informasi atau *Big Data*

Selain program pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat, pada indikator cakupan juga mencakup ketersediaan fasilitas pelayanan dalam mendukung kebutuhan masyarakat, serta menunjang kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Layanan sistem informasi yang mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Bantul dalam pengentasan kemiskinan yaitu SIDAMESRA, SIDAKIS, dan SEMAKIN.

Melalui SIDAMESRA dapat menunjang akurasi data kualifikasi masyarakat dalam kategori tingkat kemiskinan. Akurasi data tingkat kemiskinan pada masyarakat merupakan hal yang krusial agar penerima bantuan sosial maupun yang lainnya dapat tepat sasaran. Latar belakang dibuatnya SIDAMESRA yaitu sering terjadinya perbedaan dalam penilaian indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh berbagai sektor, departemen, atau kementerian sehingga menciptakan banyak versi data kemiskinan. Dampak dari perbedaan ini adalah kebingungan dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Selain, itu juga menimbulkan sikap egosektoral di antara institusi pengelola data, yang cenderung mengklaim bahwa data yang mereka hasilkan adalah yang paling akurat dan benar, mengakibatkan kurangnya proses pengecekan silang terhadap data antar sektor.

Seperti yang diketahui, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini menggunakan data dan informasi dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS.

ChatGPT data makro tersebut memiliki keterbatasan karena hanya berfungsi sebagai indikator dampak yang dapat digunakan untuk menetapkan target geografis, namun tidak dapat digunakan untuk menetapkan target individu atau keluarga miskin. Untuk menetapkan target yang spesifik pada rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan hanya melalui pendekatan agregat seperti yang digunakan dalam model-model ekonometrik.

Data ini awalnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang bersifat sentralistik, dengan penekanan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Namun, dalam kenyataannya data dan informasi seperti ini mungkin tidak mampu mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia, sebuah negara besar dengan banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, struktur sosial, keanekaragaman budaya, maupun pola ekonomi lokal. Terkadang, angka-angka kemiskinan yang dihasilkan tidak realistis untuk konteks lokal dan bahkan dapat membingungkan para pemimpin lokal seperti pemerintah kabupaten atau kota.

Sistem SIDAMESRA ini merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang berupaya untuk meningkatkan akurasi data tingkat kemiskinan pada masyarakat di Bantul sesuai indikator yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Hal ini seperti disampaikan oleh Andreas Deddy Eko Nugroho, S.I.P (Perencana Ahli Muda Bidang

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia
(Bappeda Bantul) sebagai berikut:

“Indikator yang ada di SIDAMESRA sejumlah 27 itu dikombinasikan semuanya, jadi semua indikator yang dari siapapun itu, kemudian kita telaah. Sesuai dengan tupoksi kami di Bappeda, dalam porsi melakukan koordinasi kemudian sinkronisasi, terus kita kaitkan semuanya sedikit banyak kita sudah intervensi paling tidak satu data yang dipakai” (Wawancara pada tanggal 29 Mei 2024)

Melalui Bappeda, dengan adanya SIDAMESRA kategori atau peringkat masyarakat miskin di Kabupaten dapat teridentifikasi dengan jelas *by name by addressnya*, sehingga program-program kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat akurat. Indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS pada hakikatnya diperlukan penyesuaian dengan kondisi di wilayah daerahnya. Seperti yang dikatakan Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Dinas Sosial Bantul:

“Indikator kesejahteraan sosial yang dituangkan dalam aplikasi yang namanya SIDAMESRA, itu hasil kesepakatan kalurahan se-Bantul ya, ketua TKPK tingkat kalurahan kan Pak Carik ya, kita kumpulkan kemudian kita rumuskan akhirnya jadi 27 indikator yang itu memang gabungan dari BPS dan Kemensos juga memperhatikan kondisi wilayah Bantul. Indikator BPS dan Kemensos yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Bantul. Nah, dari situ kita harapkan nanti kita lakukan pendataan sehingga kita bisa mendapatkan data mikro, harapannya bisa lebih tepat sasaran.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

Namun, SIDAMESRA merupakan sistem informasi sebagai penunjang kinerja pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan saja. Secara khusus, sistem informasi maupun website yang sifatnya dapat dilihat oleh masyarakat untuk mengetahui sebagai penerima bantuan atau tidak, pada pemerintahan Kabupaten Bantul tidak tersedia.

Adapun tampilan SIDAMESRA Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2
Tampilan SIDAMESRA

The top screenshot displays a list of households with the following data:

No	Aksi	No.KK	Kepala Rumah Tangga	Kecamatan	Desa	Pedukuhan	RT	Bobot	Status Miskin	Usulan	User Update
1	[Icons]	0000000000	ARINDRA WAHYU Candra Kurniawan	IMOGIRI	WUKIRSARI	Nogosari II	006	66	Rentan Miskin		kalwaksari 6 Jun 2024 10:24
2	[Icons]	3000000000	DWIYONO	IMOGIRI	WUKIRSARI	Tilaman	004	62	Miskin		kapimogiri 5 Jun 2024 21:04
3	[Icons]	3400000000	SUKARJO	IMOGIRI	WUKIRSARI	Bendo	002	67	Rentan Miskin		kapimogiri 5 Jun 2024 21:04
4	[Icons]	3500000000	SUKANI	IMOGIRI	WUKIRSARI	Bendo	001	87	Mampu		kapimogiri 5 Jun 2024 21:01
5	[Icons]	3000000000	SUHRANO	IMOGIRI	WUKIRSARI	Kedung Buning	004	0			kapimogiri 5 Jun 2024 20:55
6	[Icons]	5400000000	MULYADINAH	IMOGIRI	WUKIRSARI	Jatirejo	001	63	Miskin		kapimogiri 5 Jun 2024 20:45
7	[Icons]	3000000000	MULIADI	IMOGIRI	WUKIRSARI	Manggung	003	75	Rentan Miskin		kapimogiri 5 Jun 2024 20:42

The bottom screenshot displays a summary table of poverty status by region:

Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sangat Miskin		Miskin		Rentan Miskin		Mampu		KOSONG	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
010. SRANDAKAN	7.543	21.451	12	15	1.957	4.498	5.411	16.379	162	556	1	3
020. SANDEN	6.656	18.265	7	13	1.155	2.465	4.833	13.882	588	1.833	53	72
030. KRETEK	8.163	22.278	23	46	1.148	2.373	6.303	17.671	672	2.172	17	16
040. PUNDONG	8.602	24.368	41	62	1.956	4.756	6.204	18.288	401	1.262	0	0
050. BAMBANG LIPURO	11.206	31.217	85	145	2.448	5.721	7.704	22.285	944	3.041	25	25
060. PANDAK	10.614	29.956	42	58	2.837	6.508	7.509	22.640	215	726	11	24
070. BANTUL	10.453	29.419	58	67	2.188	5.264	7.045	20.407	1.146	3.636	16	45
080. JETIS	16.293	46.310	14	14	2.094	4.434	12.542	36.407	1.640	5.450	3	5
090. IMOGIRI	19.702	55.846	98	174	2.857	6.071	15.317	44.836	1.430	4.765	0	0
TOTAL	191.798	548.216	774	1.174	40.644	96.177	137.238	408.007	12.913	42.562	229	296

Kehadiran SIDAMESRA merupakan alat untuk menghasilkan data tingkat kemiskinan berdasarkan pada indikator utama dan pendukung kemiskinan yang telah ditentukan melalui pendataan *door to door* oleh kader atau pemangku wilayah setempat. Data ini penting sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian hasil kebijakan dan program yang telah dan akan dilakukan di masa depan.

Gambar 4.3
Tampilan Indikator dan Skor Instrumen SIDAMESRA

Indikator	Skor Instrumen					Akumulasi
	0	1	2	3	4	
Status penguasaan bangunan tempat tinggal (4) (f01)		Bebas sewa	Kontrak/sewa sampai dengan 3 juta per tahun	Milik orang tua/kontrak atau sewa lebih dari 3 juta per tahun	Warisan/Milik Sendiri	4
Luas lantai/bangunan per anggota keluarga (1) (f03)		< 8 m ²	8 m ² - < 16 m ²	16 m ² - < 24 m ²	>= 24 m ²	1
Jenis lantai terluas (4) (f04)		Tanah	Lantai plesteran/bata/bata/kayu kualitas rendah	Tegel/lubin/teraso/kayu kualitas tinggi	Keramik/marmor/granit	4
Jenis dinding terluas (3) (f05)		Bambu/papan/anyaman kualitas rendah	Tembok belum plesteran/plesteran kualitas rendah	Tembok plesteran kualitas sedang	Tembok/kayu kualitas tinggi	3
Jenis atap terluas (3) (f07)		Asbes/seng/genteng kualitas rendah	Asbes/seng/genteng kualitas sedang	Genteng Press/Galvalum	Beton/genteng keramik	3
Sumber air utama yang digunakan Rumah tangga untuk konsumsi (3) (f10)		Sumber air tak terlindung	Membeli eceran/Pamsimas	Sumber air terlindung	Berlanggangan PDAM/Air kemasan bermerk	3
Sumber penerangan utama (2) (f12)		Bukan listrik/listrik tanpa meteran	PLN 450 WATT	PLN 600 WATT	PLN > 900 WATT/Panel Surya	2
Bahan bakar/energi utama untuk memasak (2) (f14)		Kayu bakar/arang	Gas 3 kg	Gas 5,5 kg/biogas	Gas > 5,5 kg/listrik	2
Penggunaan fasilitas tempat buang air besar (4) (f15)		Tidak ada	Umum	Bersama	Milik sendiri	4
Jenis kloset (3) (f16)		Tidak pakai	Cemplung/bubuk/plengsengan	Kloset jongkok	Kloset duduk	3
Tempat Pembuangan Akhir Tinja (4) (f17)		Pantai/tanah lapang/kebun	Lubang tanah/Kolam/sawah/sungai	IPAL Komunal	Tangki Septik Pribadi /IPAL pribadi	4
Kepemilikan aset peralatan rumah tangga (TV layar datar minimal 32 inc, kulkas, mesin cuci)		Tidak ada	1 sampai 2	3	Lebih dari 3	2

Pemanfaatan basis data terpadu merupakan keniscayaan dalam menentukan program penanggulangan kemiskinan dan target sasaran (lokasi maupun nama/alamat penerima program), oleh karena itu pembaharuan dan sinkronisasi data kemiskinan secara periodik sehingga dapat menjadi informasi yang *up to date* menjadi kebutuhan untuk membangun kemitraan-kemitraan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Transformasi ini yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memudahkan dalam *updating* data, seperti yang disampaikan Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Dinas Sosial Bantul pada saat wawancara sebagai berikut:

“Jadi kemarin sudah dilakukan bimtek karena yang tahun ini nanti menggunakan android. Jadi kalau kemarin menggunakan papper base, print A3 itu, nah ini kita coba tekan dananya karena untuk cetak itu agak lumayan besar, anggarannya kita alihkan untuk pembuatan aplikasi android, sehingga harapannya updating itu bisa dilakukan kapan saja.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

Distribusi bantuan sosial yang dilakukan oleh kalurahan diperlukan bentuk transparansi dan tanggungjawab, agar bantuan-bantuan tersebut dapat di serahkan untuk masyarakat yang benar-benar dalam kategori miskin. Biasanya kalurahan akan menyampaikan secara langsung atau jemput bola kepada masyarakat penerima bantuan. Hal ini juga disampaikan oleh Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Dinas Sosial Bantul, menyatakan bahwa:

“adanya masukan dari kalurahan itu, supaya pak dukuh juga diberi akses untuk melihat data warga di SIDAMESRA, itu kita pertimbangkan. Karena selama ini yang bisa melihat adalah kalurahan yang bisa mendapatkan, mengolah, dan sebagainya.”
(Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sebagai penerima bantuan sosial atau tidak. Hal ini untuk menciptakan *check and balance*. *Check and balance* antara pemerintah dan masyarakat adalah suatu konsep yang mengacu pada hubungan saling mengawasi dan menyeimbangkan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat sebagai pemegang kepentingan. Konsep ini menjadi penting dalam konteks demokrasi untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Pada indikator cakupan juga mencakup ketersediaan fasilitas pelayanan dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul membuat sebuah sistem informasi yaitu SIDAKIS. Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat (SIDAKIS) merupakan sebuah platform berbasis website yang diciptakan untuk memfasilitasi

pendaftaran warga yang belum memiliki jaminan kesehatan ke dalam program Kartu Indonesia Sehat. Program ini didanai menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adanya SIDAKIS bertujuan untuk memangkas birokrasi, sehingga masyarakat Kabupaten Bantul tidak perlu datang ke Dinas Sosial untuk mengurus persoalan administratif. SIDAKIS ini dioperasikan oleh petugas Rumah Sakit seluruh Bantul dan beberapa Rumah Sakit di wilayah DIY yang sudah bekerja sama seperti Rumah Sakit Grahasia, Bethesda, Panti Rapih, Sardjito. Layanan ini berfungsi apabila dalam keadaan darurat dan masyarakat tidak terdaftar peserta BPJS maka akan dilakukan pengajuan sistem jaminan kesehatan melalui SIDAKIS dengan anggaran APBD oleh rumah sakit.

Gambar 4.4
Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat Kabupaten Bantul



SIDAKIS merupakan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat dalam menerima bantuan kesehatan. Adanya SIDAKIS menjadikan penerima bantuan sosial kesehatan dapat tercakup secara lebih

luas dan lebih banyak. Penggunaan SIDAKIS membantu masyarakat dalam menerima bantuan kesehatan. Masyarakat yang kesulitan dalam membayar rumah sakit, dapat diajukan langsung oleh pihak rumah sakit ke Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak perlu datang ke dinas terkait. Menurut Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA. (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Dinas Sosial Bantul) bahwa:

“Sebenarnya warga tidak perlu ke dinsos dulu, kita memang menyediakan ada beberapa jalur khususnya jaminan kesehatan. Kalau yang emergency, sudah masuk Rumah Sakit kita sudah menyediakan layanan namanya Sidakis, yang itu dioperasikan oleh petugas Rumah Sakit seluruh Bantul dan beberapa Rumah Sakit di wilayah DIY. Kemudian jalur yang kedua itu yang tidak emergency melalui Puskesmas di kalurahan.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

SIDAKIS, sebuah platform teknologi informasi di Kabupaten Bantul telah dirancang untuk mengelola data dan mempermudah proses pendaftaran warga ke dalam program Kartu Indonesia Sehat. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Melalui SIDAKIS, penduduk Bantul yang memenuhi syarat dapat mendaftar secara online melalui website resmi atau aplikasi khusus yang tersedia. Sistem ini tidak hanya mengumpulkan data pribadi dan informasi kesehatan masyarakat, tetapi juga memfasilitasi validasi dan verifikasi data dengan efisien. Dengan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), SIDAKIS memastikan bahwa program Kartu Indonesia Sehat dapat dikelola secara transparan dan akuntabel di Kabupaten Bantul.

Selain itu, SIDAKIS memiliki peran penting dalam memantau dan melacak penggunaan dana APBD yang dialokasikan untuk program ini, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Melalui SIDAKIS, pemerintah Kabupaten Bantul berharap dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga turut berkontribusi dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Indikator Bias

Indikator cakupan pada *policy output* menggambarkan bahwa pada tahun 2022 pemerintahan Kabupaten Bantul telah merealisasikan program-program penanggulangan kemiskinan pada penerima bantuan masing-masing program. Selain itu, pemerintah kabupaten bantul telah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan. SIDAKIS merupakan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat dalam menerima bantuan kesehatan. Melalui SIDAKIS masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti KIS dapat diberikan rekomendasi untuk jaminan kesehatan melalui anggaran daerah lewat sistem SIDAKIS di Rumah Sakit. Melalui fasilitas ini penerima bantuan kesehatan bisa mencakup lebih banyak penerima.

Namun, pada indikator cakupan ditemukan belum terdapat sistem informasi yang mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk mengetahui sebagai penerima bantuan atau tidak. Fasilitas yang selama ini tersedia merupakan sistem informasi data yang dilakukan untuk meningkatkan

kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Apabila tersedia sistem informasi bagi masyarakat untuk mengakses sebagai penerima bantuan atau tidak maka bisa terciptanya *check and balace* antara masyarakat sebagai pengawas kebijakan dengan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Secara data statistik bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul telah di mencakup beberapa bidang pada aspek kemiskinan, selain mencakup penanggulangan kemiskinan pada bidang bantuan sosial langsung, bantuan model pemberdayaan hingga penyediaan fasilitas berbasis sistem informasi/big data untuk meningkatkan cakupan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Ketepatan sasaran menjadi kunci utama untuk memastikan program yang dilaksanakan mencapai efektivitas yang optimal. Situasi yang sering muncul di tingkat bawah atau masyarakat adalah adanya bias implementasi dalam pengalokasian bantuan atas kebijakan pihak yang berwenang. Fenomena yang menarik dalam proses implementasi kebijakan adalah adanya diskresi kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat tingkat paling bawah (implementer). Secara konseptual, pejabat di tingkat bawah harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah di atasnya ketika menerapkan kebijakan. Namun dalam praktik implementasinya, kebijakan tidak selalu mematuhi semua aturan atau ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal distribusi bantuan kepada rumah tangga miskin.

Hal ini terjadi karena dalam implementasi kebijakan adalah penggunaan diskresi menjadi hal yang menarik, karena dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Penggunaan diskresi oleh pelaksana di tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) perlu dipantau secara komprehensif oleh pemerintah dan masyarakat. Langkah ini penting agar ke depannya pemerintah dapat memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan. Sukses dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat memerlukan koordinasi yang solid di antara pelaksana lapangan dan komitmen yang kokoh dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada implementasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul terjadi bias apabila bantuan tidak tepat sasaran, salah satu penyebabnya karena adanya diskresi yang terjadi pada *street-level bureaucracy*. Selain itu penyebab terjadinya bias pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul karena konfigurasi pemangku kepentingan di berbagai kalurahan sering kali didominasi oleh nepotisme dengan dalih pemerataan. Hal ini menciptakan ketidakadilan karena kebutuhan sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi dengan baik akibat kesalahan dalam distribusi program bantuan, meskipun tujuannya seharusnya bukan untuk

memberdayakan. Kondisi seperti ini dapat terjadi di berbagai daerah dalam pengimplementasian penanggulangan kemiskinan.

3. Indikator Akses

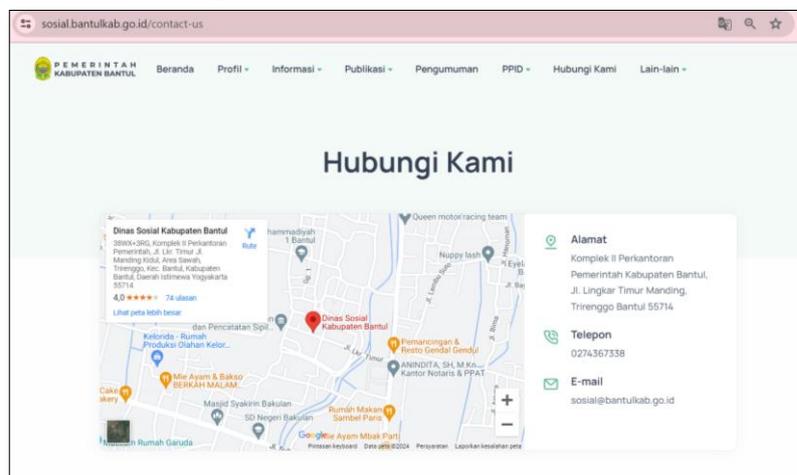
Indikator akses digunakan untuk memastikan bahwa program atau layanan yang disediakan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu, akses juga mencakup kemudahan bagi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan atau program untuk menghubungi pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, baik untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan. Konsep akses juga mencakup prinsip kesetaraan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, tanpa memandang karakteristik individual seperti jenis kelamin, etnisitas, agama, atau afiliasi politik selain itu mengukur tingkat kemudahan publik dalam memperoleh program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Akses merupakan salah satu indikator untuk mengukur implementasi kebijakan. Kemudahan kelompok sasaran dalam mengakses atau menghubungi atau berbicara dengan pemangku kebijakan menjadi faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi melalui website Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan wawancara dengan Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Dinas Sosial Bantul memuat informasi sebagai berikut:

“Di Dinas Sosial ada semacam call center atau help desk di bawah, di pelayanan itu ada WA juga untuk aduan terkait bansos”
(Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024)

Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam wawancara tersebut, bahwa call center sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan aduan maupun keluhan yang berkaitan dengan bantuan sosial maupun hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selain itu pada observasi laman website Dinas Sosial Kabupaten Bantul tidak ditemukan pelayanan aduan melalui nomor whatsapp.

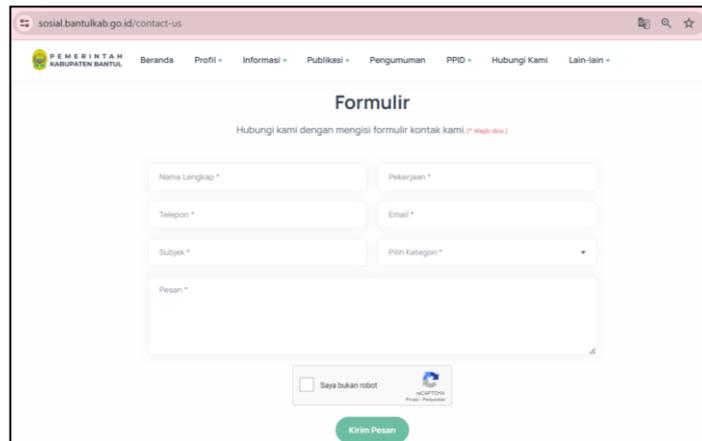
Gambar 4.5
Tampilan Website Dinas Sosial Bantul



Sumber: <https://sosial.bantulkab.go.id/contact-us>

Selain melalui *call center* atau *help desk* khusus, pada laman website Dinsos Kab. Bantul tersedia formulir online untuk masyarakat melakukan aduan yang dapat diakses pada laman berikut <https://sosial.bantulkab.go.id/contact-us>., adapun tampilannya sebagai berikut:

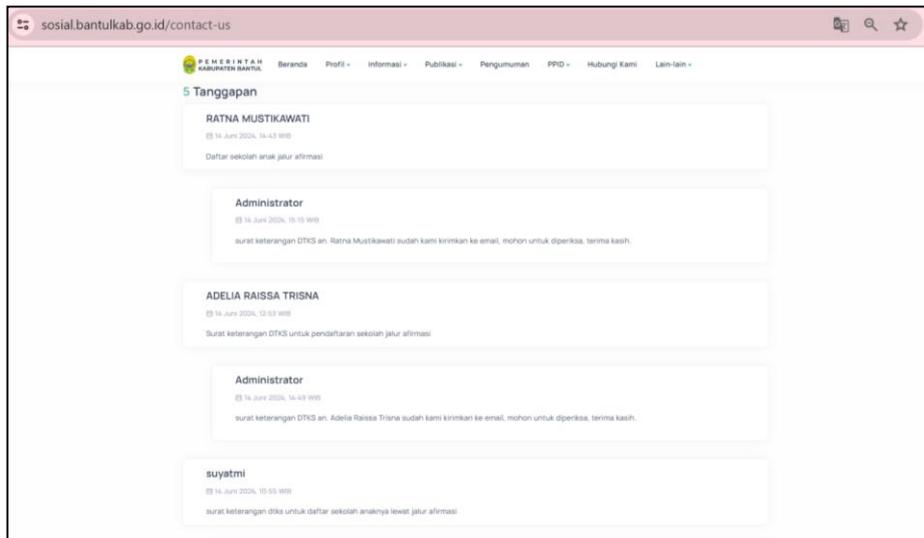
Gambar 4.6
Tampilan Formulir Aduan di Website Dinas Sosial Bantul



The image shows a web browser window displaying a contact form. The browser's address bar shows 'sosial.bantulkab.go.id/contact-us'. The website header includes the logo of the Government of Bantul Regency and a navigation menu with items: Beranda, Profil, Informasi, Publikasi, Pengumuman, PPD, Hubungi Kami, and Lain-lain. The main heading is 'Formulir' with a sub-heading 'Hubungi kami dengan mengisi formulir kontak kami.' Below this, there are several input fields: 'Nama Lengkap', 'Pekerjaan', 'Telepon', 'Email', 'Subjek', and 'Pilih Kategori'. A large text area is labeled 'Pesan'. At the bottom, there is a checkbox for 'Saya bukan robot' and a CAPTCHA image. A green button labeled 'Kirim Pesan' is positioned at the bottom center of the form.

Melalui formulir yang tersedia di website Dinas Sosial Kabupaten Bantul, masyarakat diberikan kemudahan untuk menghubungi pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut terkhususnya kebijakan yang berada dalam naungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Melalui formuli online tersebut masyarakat dapat menyampaikan kendala atau permasalahan tanpa harus datang ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Tidak hanya formulir aduan saja, respon dari dinas sosial berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh masyarakat ditanggapi secara online melalui website Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Adapun tampilan tanggapan aduan pada website Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar 4.7
Tampilan Tanggapan Formulir Aduan di Website Dinas Sosial Bantul



Sumber: <https://sosial.bantulkab.go.id/contact-us>

Beberapa akses yang disediakan oleh salah satunya Dinas Sosial telah membantu masyarakat. Namun, pada observasi yang dilakukan di laman website Dinas Sosial Kabupaten Bantul belum ditemukan kontak Whatsapp yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan aduan. Hal ini bisa ditambahkan *contact center* dalam bentuk Whatsapp, mengingat masyarakat saat ini lebih familiar dalam penggunaan whatsapp dan tidak perlu memakan waktu dalam menggunakannya. Berbeda dengan laman formulir aduan yang disediakan diperlukan mengisi seperti email, subjek, dan lain-lain. Hal ini dinilai tidak efisien dan efektif. Begitupun masyarakat lebih menyukai sesuatu yang mudah diera saat ini. Oleh karena itu, bisa menjadi bahan evaluasi dan saran agar dapat disediakan call center dalam bentuk nomor whatsapp.

4. Indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah hasil dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh kelompok sasarannya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah tersebut. Indikator ini dipergunakan untuk menilai apakah hasil dari kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran di Kabupaten Bantul, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Pada indikator ini fokus pada persepsi kelompok sasaran penerima bantuan untuk menentukan sejauh mana bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pada penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dengan penerima bantuan penanggulangan kemiskinan boga sehat, bantuan kesehatan dari Jamkesda, dan penerima RTLH, masyarakat merasa terbantu atas penyediaan bantuan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sogiran sebagai penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni APBD tahun 2022 pada wawancara, sebagai berikut:

“Kulo niki awale didata pak dukuh mas, mungale ajeng angsal bantuan renovasi omah. Alhamdulillah sampun dibangunke niki, kulo nggih wonten swadaya tapi sampun kebantu sanget dados saget di tembok”. (Wawancara pada tanggal 07 Mei 2024)

Pada program penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan pemerintah kabupaten Bantul, tidak hanya mencakup program penanggulangan kemiskinan yang bersifat bantuan langsung. Namun, juga terdapat bantuan yang bersifat pemberdayaan. Program

penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan dapat meningkatkan dan menciptakan kemandirian masyarakat Kabupaten Bantul.

Masalah sosial khususnya kemiskinan harus diatasi dengan tujuan untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut, yaitu melakukan perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau kejadian yang merusak tatanan masyarakat. Tujuan memenuhi kebutuhan berarti menyediakan layanan sosial yang dibutuhkan baik karena adanya masalah maupun untuk mencegah terjadinya masalah, serta mengembangkan kondisi menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Dalam penanggulangan kemiskinan, model-model konvensional, residual, dan karitatif perlu dimodifikasi atau direkonstruksi kembali dengan menekankan prioritas pada pemberdayaan kelompok sangat miskin, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan kemandirian kepada masyarakat dan bersifat berkelanjutan. Pernyataan disampaikan oleh Sujiyanti Diah sebagai penerima bantuan pelatihan menjahit, bahwa:

“program pelatihan menjahit ini bagus njih mas, soalnya masyarakat bisa punya ketrampilan dan bermanfaat terutama bagi ibu-ibu rumah tangga kados kulo niki. Bisa menghasilkan juga dan membantu perekonomian keluarga oleh ibu rumah tangga”.
(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2024)

Pada masing-masing penerima bantuan yang sifatnya *charity* dengan bantuan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, masyarakat menyatakan bahwa bantuan telah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa metode bantuan langsung tunai atau bantuan non tunai dengan bantuan bersifat pemberdayaan masyarakat memiliki perdebatan tersendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Nur Indah Isnaeni, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia, Bappeda Bantul dalam wawancara sebagai berikut:

“Kita itu sebenarnya di tataran kebijakan sudah bagus ya, tapi ditengah-tengahnya ini arep kepiye akhirnya pelaksanaannya jadi mawut. Itu perlu kebijakan yang mengatur di tengah-tengah. Misal contoh bantuan charity tadi, misal sekian milyar hanya diperuntukan simbah-simbah sek pancen memang wis raisoh diberdayakan, sek iseh produktif tapi masuk kategori miskin ya rasah, dadi digeser bantuan lain yang sifatnya pemberdayaan. Jadi bantuan antara satu dengan yang lain itu beda-beda, dan pengertian pak lurah sampai pak dukuh sampai pak RT itu juga bisa menyampaikan, tataran itu yang sebetulnya kita perlukan.”
(Wawancara pada tanggal 29 Mei 2024)

Pada sisi program penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pemberian bantuan seringkali gagal mengatasi akar masalah ketidakberdayaan. Bantuan finansial yang diberikan seringkali malah memperkuat ketergantungan. Meskipun tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar mandiri, seringkali bantuan semacam itu justru memperkuat sikap mental penerima bantuan daripada menginspirasi mereka untuk berperan aktif dalam meningkatkan kondisi masyarakat yang dituju.

Pada sisi program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan seringkali terkendala dengan keberlanjutan program atau kegiatan, terdapat dua pendekatan yang berbeda. Di satu sisi, banyak program atau kegiatan pemerintah mengalami masalah keberlanjutan

karena tergantung pada mobilisasi atau partisipasi yang sering kali bersifat formalitas belaka. Masyarakat sasaran sering kali diajak, dipersuasi, bahkan diperintahkan untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemberdayaan, namun sayangnya, keberlanjutannya tidak terjaga.

Di sisi lain, organisasi di luar pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan advokasi. Meskipun upaya ini mampu mengatasi masalah ketergantungan dalam beberapa kasus, namun dalam kondisi tertentu, kemajuannya seringkali lambat. Pada indikator ini, berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, masing-masing telah merasakan manfaat dan kesesuaian program tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Namun, diperlukan pengawasan dalam pengimplementasiannya agar tidak terjadi penyelewengan dan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran serta tidak dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

C. Analisis Indikator *Policy Outcome* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan kompleks yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul. Masalah ini melibatkan berbagai aspek seperti disparitas pendapatan, pengangguran, tingkat kejahatan, pendidikan rendah, ketimpangan sosial, dan berbagai permasalahan lainnya. Karena itu, penanggulangan kemiskinan selalu menjadi fokus utama dalam proses pembangunan di semua daerah. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah sering

kali dinilai dari kemampuannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menjadi indikator kunci dalam menilai kinerja pemerintah atau kepemimpinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan dianggap sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Lebih dari sekadar masalah ekonomi, kemiskinan mencakup kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar individu atau kelompok dalam aspek kehidupan sosial. Hidup dalam kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan aset produktif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Indikator *policy outcome* pada penelitian ini mengacu pada dampak awal atau *initial outcome* yang melihat pada capaian realisasi. Peneliti melakukan pengukuran dampak awal berdasarkan realisasi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu pada Tahun 2022. Dampak awal merupakan dampak kebijakan ketika masyarakat atau publik menerima bentuk pelayanan baik berupa barang maupun jasa. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu merupakan salah satu dari Misi Pemerintah Kabupaten Bantul.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing-masing PPKS merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

Berdasarkan jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) pada Tahun 2022 terbanyak adalah pada jenis PPKS fakir miskin sebanyak 54.539, pada kasus pendataan PPKS dengan jenis fakir miskin tersebut belum didapatkan dari *data by name by addressnya*. Hal ini dikarenakan mulai Tahun 2021 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang semula memiliki peringkat dan pengkategorian desil atas tingkat kesejahteraan sudah tidak lagi terakses. Sehingga fakir miskin yang dahulu dapat diambil dari DTKS pada desil 1 tidak dapat lagi dilihat jumlahnya. Pencantuman jenis fakir miskin pada PPKS di Kabupaten Bantul Tahun 2022 diambil dari KPM penerima Program PKH, hal ini dikarenakan KPM Penerima Program PKH diambil dari tingkat kesejahteraan yang paling rendah, walaupun pada saat ini sudah tidak relevan dikarenakan beberapa KPM PKH telah mengalami peningkatan kesejahteraan namun dikarenakan masih adanya komponen maka masih dapat menerima program tersebut sampai KPM PKH Graduasi.

Target dan realisasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang merupakan Indikator untuk mengukur dampak awal atau *Initial outcome* dapat dilihat pada tabel 4.12 dan 4.13. Pada tabel 4.12 telah menjelaskan bahwa PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) merupakan urusan strategis pada

pemerintah kabupaten Bantul. Kategori persentase PPKS tertinggi pada kategori fakir miskin. Selain itu jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga meliputi Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Bencana. Berikut tabel 4.12 dan 4.13 dapat ditampilkan dibawah ini.

Tabel 4.11
Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Daerah dan target Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Bantul

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan		Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhri (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang		72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668
			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori		Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 -2026, Bappeda Bantul

Tabel 4.12
Pencapaian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utam	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Realisasi
Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72.296	73,689	98,07
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,36	66,14*	95,36
	Kategori Kabupaten Layak Anak	NINDYA	NINDYA	100

*Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2022 tanggal 25 Januari 2022; data Unaudited BPK RI; *) Pagu Anggaran berdasarkan Peraturan Bupati. Bantul No.116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No. 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022*

Pada indikator dampak awal atau *initial outcome* menunjukkan bahwa beberapa sasaran strategis seperti terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), berdasarkan indikator kinerja sudah sesuai dengan target dan realisasi dengan tingkat pencapaian sebesar 98,07%.

Indikator dampak awal atau *initial outcome* hanya pada batasan realisasi sasaran strategis. Realisasi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencapai 98%, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul telah memberikan hasil awal yang positif dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun, beberapa catatan menunjukkan perlu ditingkatkan untuk mencapai realisasi 100% dan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul dapat menurun atau bahkan nol persen sesuai dengan target kabupaten maupun pusat.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul, jika dilihat dari dua alat analisis yakni indikator *policy output* dan indikator *policy outcomes* di atas, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam tahapan implementasinya.

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul DIY diantaranya:

- a. Komitmen politik dan kebijakan yang jelas, hal ini dapat dilihat dari:
 - a) Regulasi berupa Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, menjadi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Bantul.
 - b) Anggaran yang cukup. Pemerintah mengalokasikan sekitar 70% APBD Bantul untuk program kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan.
 - c) Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen. Bupati Bantul serta wakil bupati Bantul dalam hal ini sebagai ketua TKPKD

menunjukkan komitmen yang kuat untuk menurunkan angka kemiskinan di Bantul. Komitmen ini dapat dilihat dari political will serta koordinasi lintas sektoral yang padu, berjenjang, dan mengakar sampai pada tingkatan kalurahan bahkan padukuhan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

b. Koordinasi dan Kerjasama yang Baik:

- a) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memfasilitasi koordinasi antar-stakeholder dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- b) Kerjasama dengan pihak Swasta atau CSR dan masyarakat sipil untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
- c) Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan.

c. Data yang Akurat dan Terkini

Sistem Data Informasi Menuju Sejahtera (SIDAMESRA) merupakan inovasi dari Pemerinta Kabupaten Bantul untuk menyediakan basis data yang akurat dan terkini tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di Bantul. Sistem ini menampilkan peringkat kesejahteraan dari hasil pendataan melalui indikator kesejahteraan sosial (IKS) dengan indikator yang dirumuskan dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan kearifan lokal Bantul yang membedakan yakni terkait dengn kepemilikan aset.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul DIY

Dalam implementasi kebijakan tentunya terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaannya sehingga kurang berjalan secara optimal. Berikut beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul DIY:

- a. Keterbatasan Kapasitas
 - a) Anggaran, meskipun anggaran yang dialokasikan dalam APBD sudah cukup besar, namun masih belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan program penanggulangan kemiskinan.
 - b) Kevalidan data dari pendata saat melakukan pendataan IKS.
- b. Ketidaktepatan Sasaran
 - a) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan sehingga penurunan jumlah kemiskinan belum optimal.
 - b) Fungsi pendamping program bantuan dari pemerintah masih belum maksimal untuk mendorong kemandirian dari penerima manfaat.
- c. Dampak Bencana Alam:

Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir dapat menghambat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan memperburuk kondisi kemiskinan di Bantul.

E. Kebaruan

Kajian dalam penelitian adalah untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Indikator keberhasilan menjadi penting untuk melihat secara bersamaan hasil kebijakan yang dihasilkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Bantul mencetuskan aplikasi pendataan atau *big data* yang diberi nama SIDAMESRA (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera). Sistem ini menjadi penting sebagai *tools* dalam proses pengambilan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah.

Pada aplikasi ini setiap warga masyarakat yang telah terdata dapat diukur status tingkat kesejahteraan sosialnya menggunakan indikator kesejahteraan sosial, yang merupakan rumusan dari indikator BPS, kementerian, dan kearifan lokal sehingga akan didapatkan data mikro sesuai kondisi yang ada. Data di dalam penyusunan agenda kebijakan merupakan faktor penting karena untuk mengetahui target atau sasaran kebijakannya secara detail. Harapannya dengan kevalidan data ini memudahkan pemerintah dalam mengintervensi sasaran sesuai dengan kebutuhannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul telah memberikan hasil awal yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, namun masih terdapat catatan-catatan yang menjadi evaluasi dari sudut pandang sosial budaya masyarakat yaitu budaya malu dengan kemiskinannya yang masih rendah. Hasil positif tersebut dapat dilihat dari basis data terpadu secara mikro yang dibangun yaitu SIDAMESRA (Sistem Data Informasi Menuju Sejahtera), dengan mengolah indikator Permensos Nomor 3 Tahun 2021, BPS, serta kearifan lokal sehingga tersusun dua puluh tujuh indikator kesejahteraan sosial Kabupaten Bantul. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul terbagi menjadi 3 tiga aspek strategi yaitu program pengurangan beban, program pemberdayaan masyarakat, dan program sistem informasi/*bigdata*.
2. Keberhasilan penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilihat menggunakan indikator *policy output*. Pada indikator cakupan ditemukan belum terdapat sistem informasi yang mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk mengetahui sebagai penerima bantuan atau tidak. Pada indikator bias, terjadi apabila bantuan

tidak tepat sasaran, salah satu penyebabnya karena adanya diskresi yang terjadi pada *street-level bureaucracy*. Konfigurasi pemangku kepentingan di berbagai kalurahan sering kali didominasi oleh nepotisme. Pada indikator akses, laman website Dinas Sosial Kabupaten Bantul tersedia formulir online untuk masyarakat melakukan aduan dan *call center*, namun belum terdapat nomor WhatsApp yang lebih dikenal dan mudah dioperasikan oleh masyarakat luas. Pada indikator kesesuaian program dengan kebutuhan, penerima bantuan telah merasakan manfaat dan kesesuaian program tersebut dengan kebutuhan masyarakat namun diperlukan pengawasan dalam pengimplementasiannya.

3. Keberhasilan penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul juga dinilai menggunakan indikator *policy outcomes*, penelitian ini menggunakan satu aspek indikator yaitu *initial outcome* atau hasil awal kebijakan yang menunjukkan bahwa beberapa sasaran strategis seperti terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), berdasarkan indikator kinerja sudah sesuai dengan target dan realisasi.
4. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul meliputi komitmen politik serta *political will* yang kuat, koordinasi serta kerja sama yang baik, dan penyediaan data yang akurat dan terkini.
5. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul meliputi keterbatasan kapasitas, sasaran

penerima manfaat yang masih kurang tepat, dan dampak dari adanya bencana alam yang tidak menentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul yaitu:

1. Sasaran program dari masing-masing OPD perlu diperhatikan aspek kesesuaian antara kebutuhan, produktivitas atau kapasitas sasaran, dan keberlanjutan. Hal ini menjadi penting sehingga program yang digulirkan tidak asal terlaksana, tetapi dapat memberikan dampak yang keberlanjutan khususnya pada target KPM dengan usia produktif. Selain itu, kegagalan dalam pelaksanaan program menjadi keharusan untuk dievaluasi sehingga tidak hanya selesai pada pertanggungjawaban administrasi.
2. Kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sudah baik, penerima manfaat sebagai kategori pemeringkatan hasil dari SIDAMESRA juga sudah ada sehingga perlu adanya penguatan skema distribusi kebijakan ditataran pelaksanaannya dengan mengacu sasaran program sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas. Selain itu, bisa ditambahkan penilaian kesolihan atau ketaatan beragama dalam indikator kesejahteraan sosial (IKS) untuk melihat hubungan antara religius dan kemiskinan secara nyata di masyarakat.
3. Untuk membangun budaya malu terhadap status kemiskinan yang disandang, perlu pemberian tanda miskin di rumah keluarga penerima manfaat. Hal ini dibutuhkan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya

faktor ekonomi saja, melainkan faktor sosial budaya juga memberikan pengaruhnya. Perlu adanya penguatan dari sisi religius dan menumbuhkan rasa malu agar masyarakat yang sudah keluar dari kategori miskin, secara sadar dan atas kemauannya tidak lagi menerima atau mengharap bantuan dari pemerintah. Kesadaran ini menjadi penting agar tidak menimbulkan rantai kemiskinan baru dengan munculnya keluarga baru yang bertambah tetapi kuota bantuan dari pemerintah tidak tersedia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada implementasi kebijakan di salah satu Kabupaten di D.I.Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul. Selain itu, keberhasilan penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul pada indikator *policy outcomes* terdapat tiga aspek penilaian yakni indikator yang ada, yaitu *initial outcome*, *intermediate outcomes*, dan *long-term outcomes*. Pada penelitian ini peneliti hanya terbatas mengkaji satu aspek saja, yaitu *initial outcomes* atau hasil awal dari keluaran kebijakan/hasil jangka pendek karena keterbatasan waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan_Dan_Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22. <https://doi.org/10.36087/jrp.v2i1.45>
- Auliah, R. (2019). *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut*. Universitas Pasundan.
- Bawenti, J. R., Singkoh, F. C., Kimbal, A., & Perumahan, P. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Budiman, M.Nasir, Muji Mulia, Z. F. K. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syari'ah*. Penerbit Dinas Syariat Islam Aceh.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. . (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Fahreza, Arifin, J., & Suryani, L. (2019). Effectiveness of Prosperous Rice Program (Rastra) in Binangon Village , Muara Komam District Paser Regency. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrsi Bisnis*, 2(2), 566–584.
- Fidarina, F. R., & Megawati Suci Si.M., D. (2022). Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi Bisnis. *Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi*, 10(4), 1283–1292.
- Hamin, K., K, O. S., & Selanno, H. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2052–2059. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5146/>
- Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, S., & Simangungsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Kurniawan, R. C. (2021). *Etika Politik dan Pemerintahan*. Pusaka Media.
- Lismana, J., Irwansyah, I., & Jiurhadi, J. (2023). Analisis Kebijakan Program

- Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jesya*, 6(2), 2201–2211. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1250>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muliza, M. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/oikos.v6i1.4056>
- Nurhasanah, N., Safri, M., & Edi, J. K. (2019). Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 8(3), 161–169. <https://doi.org/10.22437/jels.v8i3.11993>
- Nuryanto, N., Kartiningrum, B., Primadi, M. P., Pindi, K. A. R., Nugroho, T., & Widayanti, S. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 6(2), 155–165. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.243>
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Poister, T. H. (2003). *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Rindiani, R., & Hartatik, S. (2020). Pola Konsumsi Pangan dan Asupan Makanan Penduduk Miskin di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 20(1), 13–18. <https://doi.org/10.25047/jii.v20i1.1937>
- Rusfiana, Yudi & Supriatna, C. (2021). *MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN*. Alfabeta.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 309–321. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375>
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). PENGENTASAN KEMISKINAN INDONESIA: ANALISIS INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN. *Jurnal Hexagro*, 4(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>
- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis Kebijakan Publik Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(5), 399–405. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i5.188>
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Soetomo. (2015). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar.
- Sopah, Fidaning, S., Nasution, F. A., & Mokhammad Samsul Arif. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sururi, A. (2019). Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan

- Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22. <https://doi.org/10.31845/jwk.v22i2.154>
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi kemiskinan dan strategi penanganannya : Fakta kemiskinan masyarakat pesisir kepulauan, perkotaan dan dampak dari pembangunan di indonesia*. Malang Intrans Publishing.
- Telau, Y., Engka, D. S. ., & Rompas, W. I. . (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 25–35.
- Timbuan. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Dynamics of Government Policy Implementation in. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 19*,.
- Triono, A., & Warsita, D. (2019). STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 4(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.33701/j-3p.v4i2.856>
- Umar, D. A., Mukramin, U., Arifin, J., Aziz, F., Sultan Alauddin No, J., Sari, G., Rappocini, K., Makassar, K., & Selatan Korespondensi penulis, S. (2023). Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 12–25. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.339>
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9002>
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, 2(10), 3209–3217.
- Zatriandika, I. F. (2021). *STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN WARGA DI KABUPATEN SINJAI*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara

1) Panduan Wawancara Bupati Bantul

H. Abdul Halim Muslih

1. Apa saja kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi angka kemiskinan di Bantul? Programnya seperti apa?
2. Bagaimana kesesuaian program kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap kebutuhan masyarakat?
3. OPD apa saja yang berperan menjadi stakeholder untuk implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan?
4. Apakah ada kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan? Bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
5. Jika dipersentasikan berapa penganggaran APBD untuk penanggulangan kemiskinan?
6. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan? Apakah terdapat penyimpangan?
7. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan?

2) Panduan Wawancara Ketua DPRD Bantul

H. Hanung Raharjo, S.T.

1. Apa saja kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Bantul?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten Bantul?
3. Apakah ada kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan? Bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
4. Berapa besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dari APBD?
5. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan?
7. Apakah terdapat penyimpangan dalam implementasi kebijakan tersebut?

3) Panduan Wawancara Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bantul

Joko B. Purnomo

1. Sejauh mana peran TKPK mengkoordinasikan stakeholder dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Bantul? Bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih program?
2. OPD apa saja yang berperan menjadi stakeholder untuk implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan?
3. Apa saja program penanggulangan kemiskinan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul?
4. Bagaimana kesesuaian program kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap kebutuhan masyarakat?
5. Apakah ada kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan? Bagaimana bentuk kerjasama tersebut?
6. Bagaimana Bapak selaku ketua TKPK mengevaluasi program dari kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan?

4) Panduan Wawancara Bappeda Bantul

- a. Nur Indah Isnaeni, S.E., M.Si. (Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia)
 - b. Andreas Deddy Eko Nugroho, S.I.P (Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia /Bappeda Bantul)
1. Apa saja program penanggulangan kemiskinan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul?
 2. Seberapa besar keluarga penerima manfaat yang dapat dijangkau oleh program kebijakan Pemerinta Kabupaten Bantul?
 3. Bagaimana cara menentukan kelompok prioritas dalam penanggulangan kemiskinan?
 4. Apa rencana tindak lanjut atau perbaikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan?
 5. Inovasi atau sistem apa yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membantu pelaksanaan kebijakan?
 6. Seberapa besar pemanfaatan aplikasi SIDAMESRA untuk penanggulangan kemiskinan?
 7. Bagaimana Bappeda mengkoordinasikan antarstakeholder agar tidak terjadi tumpang tindih program?

5) Panduan Wawancara Dinas Sosial Bantul

Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA. (Kepala Bidang Pemberdayaan sosial)

1. Apa saja program penanggulangan kemiskinan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya di Dinas Sosial?
2. Seberapa besar keluarga penerima manfaat yang dapat dijangkau oleh program kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul?
3. Wilayah mana yang mempunyai angka kemiskinan paling tinggi di Kabupaten Bantul?
4. Bagaimana cara menentukan kelompok prioritas dalam penanggulangan kemiskinan?
5. Bagaimana cara mengukur angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul?
6. Bagaimana data terkini terkait angka kemiskinan di Kabupaten Bantul?
7. Inovasi atau sistem apa yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membantu dalam pelaksanaan programnya?
8. Bagaimana pemanfaatan sistem atau aplikasi tersebut? Sejauh mana memberikan dampak bagi masyarakat?
9. Apakah terdapat call center atau help desk yang dapat diakses oleh masyarakat untuk program penanggulangan kemiskinan?

6) Panduan Wawancara Keluarga Penerima Manfaat Program

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul

- a. Penerima Program Jaminan Kesehatan Daerah
 - b. Penerima Program Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Penerima Program Pelatihan Menjahit
 - d. Penerima Program Boga Sehat
1. Sejak kapan bapak atau ibu menjadi keluarga penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul?
 2. Bagaimana bapak atau ibu bisa terpilih menjadi keluarga penerima manfaat tersebut?
 3. Apa yang sudah bapak atau ibu dapatkan dari program tersebut?
 4. Apakah program dari Pemerintah Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan kebutuhan penerima?
 5. Bagaimana dampak dari program Pemerintah Kabupaten Bantul yang bapak atau ibu rasakan setelah menerimanya?

2. Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Tri Galih Prasetya, S.Kep.Ns., M.PA. (Kepala Bidang Pemberdayaan sosial/Dinas Sosial Bantul)



Wawancara bersama Nur Indah Isnaeni, S.E., M.Si. (Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia/Bappeda Bantul)



Wawancara bersama H. Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul)



Wawancara bersama Joko B. Purnomo (Ketua TKPK Bantul)



Wawancara bersama H. Hanung Raharjo, S.T. (Ketua DPRD Bantul)



Wawancara bersama Penerima RLTH APBD Tahun 2022



Penyaluran Program Boga Sehat Kabupaten Bantul



Wawancara bersama Penerima Manfaat Program Boga Sehat Kabupaten Bantul

3. Daftar Dokumen

1. Booklet BPS 2023 Kemiskinan Kabupaten Bantul
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
4. Buku Profil Daerah Kabupaten Bantul
5. Buku CSR membangun Bantul Tahun 2022
6. Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

4. Daftar Observasi

No	Uraian Pengamatan	Keterangan
1.	Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul	
2.	Struktur organisasi TKPK Kabupaten Bantul	
3.	Sistem pendataan kemiskinan Kabupaten Bantul	
4.	Data keluarga penerima manfaat program	
5.	Kondisi keluarga penerima manfaat program	
6.	Hasil kebijakan yang diterimakan keluarga penerima manfaat	
7.	Program kebijakan Kabupaten Bantul	
8.	Laporan Realisasi APBD Tahun 2022	

PANGAN DAN SANDANG				
NO	INDIKATOR	PENJELASAN	INSTRUMEN INDIKATOR*	KET
12	Dalam sebulan terakhir, seluruh anggota keluarga tidak mampu makan 2x sehari	Tidak mampu makan karena alasan ekonomi, tidak punya uang untuk membeli bahan makanan	0 Ya 4 Tidak	
13	Dalam seminggu terakhir, konsumsi daging/susu/ protein hewani lainnya	Kemampuan makan daging/ susu/ protein karena alasan ekonomi, tidak punya uang untuk membeli bahan protein hewani	0 Tidak pernah 1 1x 2 2-3 kali 3 4-6 kali 4 Setiap hari	
14	Dalam enam bulan terakhir, membeli pakaian baru	Mampu atau memiliki cukup uang untuk membeli pakaian baru	1 Tidak 4 Ya	

KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
NO	INDIKATOR	PENJELASAN	INSTRUMEN INDIKATOR*	KET
15	Akses layanan kesehatan	Kemampuan mengakses layanan kesehatan	1 Tidak mampu 4 Mampu	
16	Keluarga dengan disabilitas	Penyandang disabilitas dalam satu keluarga	0 Kepala keluarga dan semua anggota 1 Kepala keluarga dan sebagian anggota 2 Kepala Keluarga 3 Anggota keluarga 4 Tidak ada	
17	Keluarga dengan penyakit kronis/menahun/ katastrofik *	Penyandang penyakit kronis/menahun/ katastrofik dalam satu keluarga	0 Kepala keluarga dan semua anggota 1 Kepala keluarga dan sebagian anggota 2 Kepala Keluarga 3 Anggota keluarga 4 Tidak ada	
18	Ijazah tertinggi yang dimiliki dalam keluarga	Ijazah dari salah satu anggota keluarga dengan pendidikan tertinggi	1 Tidak sekolah/SD sederajat 2 SMP sederajat 3 SMA sederajat 4 Perguruan Tinggi	
19	Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sekolah non beasiswa/bantuan	Jumlah anggota keluarga usia 6-19 tahun yang masih bersekolah dengan biaya sendiri tanpa beasiswa / bantuan (menjadi tanggungan keluarga)	1 > 3 orang 2 2-3 orang 3 1 orang 4 Tidak ada	

SUMBER PENGHASILAN				
NO	INDIKATOR	PENJELASAN	INSTRUMEN INDIKATOR*	KET
20	Status kedudukan dalam pekerjaan utama dalam 6 bulan terakhir	Status pekerjaan utama dalam keluarga dalam 6 bulan terakhir (status pekerjaan dengan penghasilan tertinggi dalam keluarga)	1 Buruh serabutan/petani penggarap/tidak bekerja 2 Pedagang/industri mikro barang atau jasa/Petani 3 Karyawan/pegawai swasta/pekerja bebas non pertanian/pekerja migran/ Pedagang/industri kecil barang atau jasa 4 PNS/Polri/TNI/BUMD/BUMN/ Pensiunan/Pejabat Negara/ Anggota legislatif/Pamong desa/Pedagang/industri menengah/besar barang atau jasa	
21	Jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan dalam 6 bulan terakhir	Jumlah anggota keluarga yang bekerja atau memiliki penghasilan dalam 6 bulan terakhir	1 Tidak ada 2 1 orang 3 2-3 orang 4 > 3 orang	
22	Pendapatan per kapita per bulan dalam 6 bulan terakhir	Dihitung dari total pendapatan keluarga per bulan dibagi dengan jumlah anggota keluarga selama 6 bulan terakhir	1 < 500 ribu 2 500 - < 700 ribu 3 700 ribu - < 1 juta 4 ≥ 1 juta	

KEPEMILIKAN ASET ATAU BARANG				
NO	INDIKATOR	PENJELASAN	INSTRUMEN INDIKATOR*	KET
23	Kepemilikan aset elektronik yang berkualitas	Kepemilikan aset elektronik yang berkualitas adalah TV layar datar minimal 32 inc, kulkas, mesin cuci, laptop/komputer, AC	1 Tidak ada 2 1 sampai 2 3 3 4 lebih dari 3	
24	Kepemilikan alat transportasi motor	Akumulasi harga kepemilikan semua alat transportasi motor	1 < 10 juta 2 10 - < 30 juta 3 30 juta - < 50 juta 4 ≥ 50 juta	
25	Kepemilikan alat transportasi mobil	Akumulasi harga kepemilikan semua alat transportasi mobil	1 Tidak ada 2 < 100 juta 3 100 - 500 juta 4 > 500 juta	
26	Kepemilikan aset tidak bergerak di tempat lain	Tidak termasuk lahan/bangunan yang ditempati	1 Tidak punya lahan dan bangunan 2 Punya lahan 3 Punya lahan dan bangunan 4 Punya lahan dan/atau bangunan sebagai tempat usaha/ tanaman bernilai tinggi	
27	Kepemilikan hewan ternak	Dihitung dengan menjumlahkan harga jual semua hewan ternak yang dimiliki	1 Tidak ada/harga jual < 10 juta 2 Harga jual 10 - < 20 juta 3 Harga jual 20 - < 50 juta 4 Harga jual ≥ 50 juta	

TANDA TANGAN		
Petugas Pengentri	Petugas Pendata	Responden
(.....)	(.....)	(.....)